

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN  
JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR  
2014-2024**



**Oleh:**

**Aprilia Restuning Tunggal**

**NIM: 20300012002**

**DISERTASI**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor Studi Islam  
Bidang Kajian Timur Tengah**

**YOGYAKARTA  
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI  
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal  
NIM : 20300012002  
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



**Aprilia Restuning Tunggal**

**NIM: 20300012002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Judul Disertasi : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN  
JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-  
2024  
Ditulis oleh : Aprilia Restuning Tunggal  
NIM : 20300012002  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah (KTT)

**Telah dapat diterima**  
**Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)**  
**Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 08 Januari 2025

  
Rektor/  
Ketua Sidang,  
  
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP.: 195702071987031003

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 07 Mei 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **APRILIA RESTUNING TUNGGAL**, NOMOR INDUK: 20300012002 LAHIR DI KUDUS TANGGAL 06 APRIL 1987,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~/SANGAT MEMUASKAN/~~MEMUASKAN~~\*\*


KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI KAJIAN TIMUR TENGAH (KTT)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-999

YOGYAKARTA, 08 JANUARI 2025

An. REKTOR /  
KETUA SIDANG



  
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP.: 195702071987031003

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Aprilia Restuning Tunggal  
NIM : 20300012002  
Judul Disertasi : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MESIR:  
ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI  
MESIR 2014-2024

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.  
(Promotor/Penguji)
2. Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D.  
(Promotor/Penguji)
3. Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.  
(Penguji)
4. Dr. Munirul Ikhwan  
(Penguji)
5. Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati  
(Penguji)
6. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.  
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Rabu Tanggal 08 Januari 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : .....  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

NIP.: 197412141999031002

## PENGESAHAN PROMOTOR


**Promotor I**

**Prof. Dr. Ibnu Burdah, S.Ag., M.A.**

(  )

**Promotor II**

**Dr. Mohammad Yunus Masrukhin, Lc., M.A.**

(  )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO  
WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024**

yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal.  
NIM : 20300012002/S3  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 November 2024  
Promotor,



Prof. Dr. Ibnu Burdah, S.Ag., M.A.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO  
WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024**

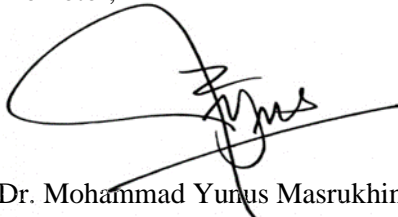
yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal.  
NIM : 20300012002/S3  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 02 November 2024  
Promotor,



Dr. Mohammad Yunus Masrukhin, Lc., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MESIR: ALASAN  
DIBALIK PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024**

yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal.  
NIM : 20300012002/S3  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 September 2024

Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO  
WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024**

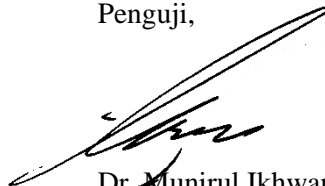
yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal.  
NIM : 20300012002/S3  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Oktober 2024  
Penguji,



Dr. Munirul Ikhwan, Lc.,M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO  
WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024**

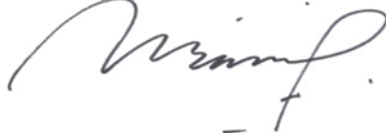
yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Restuning Tunggal.  
NIM : 20300012002/S3  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 September 2024  
Penguji,



Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.

## ABSTRAK

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir telah berkembang sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Pada masa Soekarno, politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir berada dalam posisi yang sangat kuat dan ideal. Namun, situasi ini berbeda pada masa Soeharto, di mana hubungan tersebut berada pada posisi yang cukup memprihatinkan. Upaya penguatan hubungan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dilakukan melalui kunjungan kenegaraan Soeharto ke Mesir, melanjutkan tradisi yang dimulai oleh Soekarno. Kunjungan kenegaraan ke Mesir ini menjadi tradisi yang berlanjut pada masa Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, transisi kepemimpinan dari SBY ke Joko Widodo membawa perubahan signifikan terhadap tradisi politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir. Ketidakhadiran Joko Widodo dalam beberapa kesempatan untuk mengunjungi Mesir menimbulkan tanda tanya besar dan menciptakan persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa kebijakan politik luar negeri Joko Widodo terhadap Mesir tampak berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, serta mengidentifikasi pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan Joko Widodo untuk tidak mengunjungi Mesir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Pendekatan teoritis yang digunakan melibatkan analisis kebijakan luar negeri serta konsep psikologis dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir pada masa kepemimpinan Joko Widodo mengalami perubahan dibandingkan tradisi presiden-presiden sebelumnya. Perubahan tersebut ditandai dengan tidak adanya

kunjungan Joko Widodo ke Mesir dan pergeseran prioritas politik luar negeri Indonesia yang kini lebih mengutamakan kerja sama ekonomi dan investasi dengan Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengunjungi Mesir mencakup situasi domestik Mesir pasca Arab Spring yang belum sepenuhnya stabil, latar belakang individu Joko Widodo, serta pertimbangan kognitif (psikologis) Joko Widodo terhadap informasi yang diyakininya.

**Kata kunci:** Indonesia, Politik Luar Negeri, Mesir, Joko Widodo



## ABSTRACT

This dissertation research aims to analyze and address Indonesia's foreign policy towards Egypt, spanning from the presidency of Soekarno to that of Joko Widodo. During Soekarno's tenure, Indonesia's foreign policy towards Egypt was characterized by strong and ideal relations. However, this changed significantly under Soeharto, whose approach to Egypt was relatively more concerning. Efforts to strengthen Indonesia's foreign policy towards Egypt were made through state visits, as initiated by Soekarno. These state visits became a continuing tradition under subsequent presidents, including Abdurrahman Wahid, Megawati, and Susilo Bambang Yudhoyono. The transition from SBY to Joko Widodo marked a shift in this tradition. Joko Widodo's absence from state visits to Egypt on several occasions has raised significant questions and represents an unprecedented deviation in Indonesia's foreign policy. This research seeks to understand why Joko Widodo's foreign policy towards Egypt differs from his predecessors and explores the considerations behind his decision not to visit Egypt. This study employs a qualitative research approach, using case study methods. Primary data were gathered through interviews, while secondary data were collected via documentation and literature review. The theoretical framework incorporates foreign policy analysis and psychological concepts related to foreign policy decision-making. The findings reveal that Indonesia's foreign policy towards Egypt under Joko Widodo has diverged from the established traditions of previous presidents. This shift is evidenced by the absence of presidential visits to Egypt and a reorientation of Indonesia's foreign policy priorities. These now emphasize economic cooperation and investment, particularly with China, the UAE, and Saudi Arabia. Several factors influenced Joko Widodo's decision, including Egypt's domestic situation following the Arab Spring, which remains unstable, as well as Joko Widodo's personal background and cognitive (psychological) considerations regarding the information available to him.

**Keywords:** *Indonesia, Foreign Policy, Egypt, Joko Widodo*

## مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحليل والإجابة على كيفية تطور السياسة الخارجية الإندونيسية تجاه مصر منذ عهد الرئيس سوكارنو حتى عهد الرئيس جوكو ويدودو. في عهد سوكارنو، كانت السياسة الخارجية لإندونيسيا تجاه مصر في وضع قوي ومثالي. ولكن للأسف تغير الوضع في عهد سوهارتو، حيث كانت العلاقات في وضع مقلق إلى حد ما. تم تعزيز العلاقات السياسية الخارجية لإندونيسيا تجاه مصر من خلال زيارة سوهارتو الرسمية إلى مصر، استمراريةً للتقليد الذي بدأه سوكارنو. أصبحت هذه الزيارة الرسمية إلى مصر تقليدًا مستمرًا في عهود من بعده وهم عبد الرحمن وحيد، ميغاواتي، وسوسيلو بامبانغ يودويونو. ومع ذلك، فإن الانتقال من قيادة سوسيلو بامبانغ يودويونو إلى جوكو ويدودو جلب تغييرًا كبيرًا في تقاليد السياسة الخارجية لإندونيسيا تجاه مصر. إن غياب جوكو ويدودو عن بعض الفرص لزيارة مصر أثار تساؤلات كبيرة وجعل مشكلة لم تحدث من قبل في تاريخ السياسة الخارجية الإندونيسية. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على سبب اختلاف سياسة جوكو ويدودو الخارجية تجاه مصر مقارنةً مع الرؤساء السابقين، بالإضافة إلى تحديد الاعتبارات التي شكلت قرار جوكو ويدودو بعدم زيارة مصر. تستخدم الدراسة المنهج الكيفي مع المدخل القائم على دراسة الحالة. وتم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية عبر تقنيات التوثيق والدراسات المكتبية. المدخل النظري المستخدم يشمل تحليل السياسة الخارجية وكذلك المفاهيم النفسية في اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية. أظهرت نتائج



الدراسة أن السياسة الخارجية لإندونيسيا تجاه مصر في عهد جوكو ويدودو قد شهدت تغيراً مقارنة بتقاليد الرؤساء السابقين. يتميز هذا التغير بعدم زيارة جوكو ويدودو إلى مصر وتحول أولويات السياسة الخارجية لإندونيسيا التي أصبحت تركز أكثر على التعاون الاقتصادي والاستثمار مع الصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. أما العوامل التي أثرت في قرار الرئيس جوكو ويدودو بعدم زيارة مصر فهي بوجود الوضع الداخلي في مصر بعد الربيع العربي الذي لم يستقر بالكامل، والخلفية الفردية لجوكو ويدودو، بالإضافة إلى الاعتبارات المعرفية (النفسية) لجوكو ويدودو تجاه المعلومات التي يعتقد بها.

الكلمات المفتاحية: إندونيسيا، السياسة الخارجية، مصر، جوكو ويدودو



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

## C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi 'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

## D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	Ā	فَتَاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

## E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

## F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i 'ānah at-ṭālībīn</i>

## G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fathah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

## H. Kata Sandang alif dan lām atau "al-"

1. Bila diikuti huruf gamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb,*

*Alhamdulillahirabbilaamiin hamdan shakirin*, segala puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai Mahasiswa Doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan Shafaatnya di hari akhir. Penelitian yang kami lakukan ini berjudul **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MESIR: ALASAN DI BALIK PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR 2014-2024”** telah didorong oleh banyak pihak diluar sana, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan *support* dan kemudahan dalam menulis disertasi ini.

*Pertama*, penulis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada ayahanda dan ibunda yang selama ini telah banyak membantu dalam membiayai perkuliahan ini dari awal hingga saat ini. Motivasi dan semangatnya agar disertasi ini dapat segera selesai senantiasa disampaikan oleh kedua orang tua kami.

*Kedua*, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak promotor Prof. Dr. Ibnu Burdah, M.A. dan Dr. Muhammad Yunus Masrukhin, Lc., M.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu mengarahkan, dan membimbing penulisan disertasi ini. Atas sumbangsih beliau, kami sekali lagi megucapkan terima kasih.

*Ketiga*, kami mengucapkan terima kasih juga kepada para Bapak Ibu penguji; Ibu Dr. Siti Mutiah Setiawati, Bapak Dr. Munirul Ikhwan, dan Bapak Dr. Achmad Uzair serta segenap Dosen di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, mengajar dan mendidik kami selama kami menuntut ilmu, belajar dan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Keempat*, kepada keluarga besar H. Mat Iksan dan Hj. Widayatsih, Anakku Sheikhha Malika Al-Mayassa, Sheqiqa Madiena Al-Khaema, istriku yang tercinta Selmi Kusumawati, adik-adikku Ipar Okto Dwija Setiawan dan Dek Okta dan keponakan yang cantik Delisha Al-Shamsa Dwija, semoga sehat selalu dan mendapatkan keberkahan serta lindungan Allah dalam hidup.

*Kelima*, keluarga besar Mbah H. Marto Rejo dan Mbah Hj. Murniati Muria, Pakde Bude, Om dan Bulek serta keponakan-keponakan. Keluarga Mbah H. Abdul Wakid, Mbah Hj. Murni, Mbah Hj. Miatun Kapuan. Pakde Bude, Bulek Om dan keponakan-keponakan semua.

*Keenam*, kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu dalam penulisan Disertasi selama ini.

*Ketujuh*, keluarga besar Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dan keluarga besar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, terima kasih atas atensinya yang telah diberikan.

Kami berdoa agar penelitian disertasi yang sudah kami tulis ini dapat bermanfaat bagi insan akademika, masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT atas tahapan yang saat ini sedang dilalui oleh peneliti. Akhirul kalam, Wabillahirtaufik Walhidayah.

*Wassalamualaikum Wr, Wb,*

Yogyakarta, 25 November 2024  
Penulis,

Aprilia Restuning Tunggal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM .....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxviii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori .....	22
1. Kebijakan Luar Negeri ( <i>Foreign Policy</i> ) .....	22
2. Teori Pilihan Rasional ( <i>Rational Choice</i> ) .....	29
3. Pendekatan Psikologis dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri.....	32
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Pembahasan .....	37

<b>BAB II SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA MESIR DAN PERJALANAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MESIR .....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir.....	42

1. Mesir sebagai Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia .....	42
2. Indonesia-Mesir sebagai Pendiri Gerakan Non-Blok (GNB).....	46
3. Kerjasama Indonesia-Mesir di bidang Pendidikan dan Keagamaan .....	51
4. <i>Partnership</i> Indonesia-Mesir di Sektor Ekonomi dan Perdagangan.....	57
5. Hubungan <i>People to People</i> antara Indonesia-Mesir .....	61
B. Perjalanan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Mesir.....	67
1. Konsepsi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif .....	67
2. Masa Kepemimpinan Presiden Sukarno (1945-1965) .....	75
3. Masa Presiden Soeharto (1965-1998) .....	87
4. Periode Presiden Habibie (Masa Reformasi) 1998 .....	95
5. Masa Presiden Abdurrahman Wahid .....	100
6. Masa Presiden Megawati .....	105
7. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 .....	110
C. Kesimpulan .....	115

### **BAB III PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MESIR PADA MASA PRESIDEN JOKO WIDODO ..... 119**

A. Haluan Baru Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo .....	120
1. Pandangan Presiden Joko Widodo Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia .....	120
2. Reorientasi Politik Luar Negeri yang berbasis pada kebutuhan Ekonomi.....	125



B. Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo dalam kaitannya terhadap Mesir (2014-2024) .....	128
1. Moderasi Beragama dan Gagasan Wasatiyyah Al-Azhar di era Presiden Joko Widodo .....	128
2. Perubahan Kebijakan Presiden Joko Widodo dari Tradisi Politik Luar Negeri Presiden Sebelumnya .....	134
3. Pengaruh adanya Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Mesir .....	142
C. Peran Besar Mesir terhadap Paham <i>Islam Wasathiyyah</i> di Indonesia .....	144
D. Kesimpulan .....	148

#### **BAB IV PRIORITY POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI MASA KEPEMIMPINAN**

##### **PRESIDEN JOKO WIDODO ..... 151**

A. Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Presiden Joko Widodo .....	152
1. Prioritas Penguatan Diplomasi Ekonomi .....	152
2. Penguatan Kerjasama Ekonomi di Kawasan Asia Timur (Tiongkok) .....	164
3. Kemitraan Strategis di Kawasan Timur Tengah dengan negara UAE dan Arab Saudi .....	172
B. Kesimpulan .....	183

#### **BAB V PERGOLAKAN DALAM NEGERI MESIR DAN PERTIMBANGAN PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MENGUNJUNGI MESIR ..... 185**

A. Instabilitas Politik ( <i>Political Disoreder</i> ) yang terjadi di Mesir .....	186
1. Tumbangnya Pemerintahan Otoriter Presiden Hosni Mubarak .....	186
2. Revolusi Mesir dan Rezim Baru di Bawah Presiden Mohammad Morsi .....	195

3. Peristiwa Kudeta Militer di Mesir dari Presiden Morsi menuju Presiden Al-Sisi .....	199
4. Pergolakan Dalam Negeri Mesir dan Sikap Pemerintah Indonesia .....	204
B. Pertimbangan Presiden Joko Widodo tidak Mengunjungi Mesir (2014-2024).....	216
1. Analisis Individual (Latar Belakang Presiden Joko Widodo) .....	216
2. Karakter Kepemimpinan Presiden Joko Widodo .	219
3. Pertimbangan Kognitif (Kepercayaan Presiden Joko Widodo terhadap Mitologi Jawa) .	227
C. Kesimpulan .....	230
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>235</b>
A. Kesimpulan .....	235
B. Saran.....	238
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>241</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>272</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1    Daftar Perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Mesir
- Tabel 2    Daftar Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Mesir
- Tabel 3    Profil Negara Republik Arabesir



## DAFTAR GAMBAR

Catatan: Informasi tentang gambar ada di bawah gambarnya.

Gambar 1 Pola kerangka berfikir Kebijakan Luar Negeri

Gambar 2 Peta Negara Mesir

Gambar 3 Peta Negara di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kajian dan penelitian tentang kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah, Mesir menjadi salah satu negara yang menarik bagi terselenggaranya hubungan politik luar negeri Indonesia. Menurut pendapat M. Aji Surya sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Kairo, Mesir masih menjadi kekuatan besar di Timur Tengah dan sangat diperhitungkan, sehingga Mesir menjadi strategis dalam hubungan banyak hal bagi Indonesia, termasuk dalam menjangkau Palestina. Dalam wawancara tersebut ia juga menyebutkan bahwa kantor Kedutaan Besar RI yang berada di Kairo merupakan kantor perwakilan yang terbesar di benua Afrika dengan jumlah pegawai yang sangat banyak. Selain itu adanya Wakil Duta Besar yang berada di Kairo menunjukkan bahwa Indonesia menjadikan Mesir itu penting atau menjadi skala prioritas,<sup>1</sup> karena semua bantuan Indonesia yang diberikan kepada Palestina pintu masuknya melalui jalur Mesir.

Rania Ahmed Hemaïd juga mengatakan dalam penelitiannya, Mesir telah menjadi pusat perhatian dan tempat yang tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah saja, namun juga sebagai jembatan antara dunia Arab dan Eropa, serta dengan Asia dan Afrika. Ia juga menambahkan bahwa secara geografis keberadaan Mesir yang terletak diantara benua Asia dan Afrika, di tengah laut dan benua Eropa, mempengaruhi dalam hubungannya dengan negara-negara di sekitarnya. Selain itu selama dalam perjalanan sejarah, Mesir juga telah banyak memainkan peran penting dan pengaruhnya di kawasan tersebut.<sup>2</sup> Keberadaan kota Kairo juga menjadi tempat yang dianggap

---

<sup>1</sup> M. Aji Surya, "Deputy Chief of Mission the Embassy of the Republic of Indonesia to Kairo," (2020). Wawancara dengan Bapak Wakil Duta Besar RI untuk Kairo.

<sup>2</sup> Ahmed Hemaïd Rania, "Egyptian Foreign Policy (Special Reference after The 25th of January Revolution)" (University of Madrid, 2017).

strategis dalam isu besar di kawasan Timur Tengah.<sup>3</sup> Saleh Dawud Hammad mengatakan Mesir selalu memiliki posisi strategis dalam isu politik dan hubungan internasional, tidak berlebihan jika Tiongkok mengakui dan menempatkan Mesir sebagai mitra yang strategis dalam politik luar negerinya di Timur Tengah.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu 78 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Mesir juga tidak pernah diwarnai adanya ketegangan suatu apapun.<sup>5</sup> Menurut Duta Besar Mesir untuk Indonesia Dr. Baha Dessouki hubungan antara Mesir-Indonesia tidak sekedar hubungan bilateral dua negara akan tetapi jauh lebih mendalam yaitu hubungan persaudaraan.<sup>6</sup> Indonesia dan Mesir dikenal sebagai tokoh utama dalam lahirnya sejarah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April 1955.<sup>7</sup> Presiden Soekarno dan Presiden Gamal Abdel Nasser beserta tiga tokoh lainnya disebut sebagai pendiri Gerakan Non-Blok.<sup>8</sup>

Bagi Indonesia Mesir merupakan negara yang memiliki peran sangat fundamental dalam mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Mesir menjadi negara pertama yang memberikan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia.<sup>9</sup> Pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian persahabatan pada 10 Juni 1947.<sup>10</sup> Tanpa adanya pengakuan

---

<sup>3</sup> Andrea Teti, "Political and Social Change in Egypt: Arab Transformation Project," 2017.

<sup>4</sup> Saleh Dawud Hammad, الخارجية السياسية للدراسات العربي الديمقراطي املركز, "تجاه الصينية", 2019.

<sup>5</sup> Aprilia Restuning Tunggal, "Indonesia-Egypt Diplomacy: Darussalam Gontor and Al-Azhar University," *Journal of Islamic World and Politics* 4, no. 1 (2019): 49–55.

<sup>6</sup> Bahaiddin Bahjah Ibrahim Dessouki, "Ambassador of Egypt to Jakarta" (2016).

<sup>7</sup> National Archives of the Republic of Indonesia, "Guide Asian-African Conference Archives," (2014).

<sup>8</sup> Kementerian Luar Negeri RI, "Gerakan Non-Blok," Kementerian Luar Negeri RI, 2014, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman\\_list\\_lainnya/](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/).

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri RI, "Sejarah Hubungan Indonesia Mesir," Kementerian Luar Negeri RI, 2022, <https://kemlu.go.id/Kairo/id/read/sejarah-hubungan-indonesia-mesir/1900/etc-menu>.

<sup>10</sup> Abdurrahman Mohammad Fachir, "Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Tentang Teori Resiprositas," *Jurnal CMES* 7, no. 2 (2014).

dari negara lain, sebuah negara tidak memiliki keabsahan dalam forum internasional. Karena secara *dejure* pengakuan dari negara lain menjadi syarat suatu negara yang kemudian dapat diakui oleh dunia internasional.<sup>11</sup>

Hubungan persahabatan kedua negara juga berjalan begitu hangat, hal tersebut dapat digambarkan melalui banyaknya pelajar Indonesia yang belajar di Mesir, banyaknya masyarakat Indonesia yang menikah dengan orang Mesir serta hubungan persahabatan antara individu yang begitu dekat, seperti kedekatan antara Soekarno dan Gamal Abdel Nasser.<sup>12</sup> Istilah perumpamaan kakak beradik antara Indonesia-Mesir menjadi *trigger* untuk saling memajukan satu sama lain<sup>13</sup> serta penyebutan yang sering digunakan oleh orang Mesir sendiri bahwa *Masr Ummu ad-Dunya* menjadi begitu dekat.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam konteks moderasi beragama serta gagasan Wasatiyyah Al-Azhar di Indonesia, peran Mesir terhadap moderasi beragama yang sudah berjalan di Indonesia diakui cukup signifikan. Dapat peneliti tegaskan bahwa umat Islam di Indonesia saat ini telah memiliki padangan yang lebih moderat. Hal ini menjadi modal yang cukup besar bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Umat Islam di Indonesia memiliki pandangan jalan tengah dan moderat dalam pendekatan Islam, mereka tidak mudah berlaku ekstrim terhadap salah satu golongan dan menjunjung tinggi toleransi dalam beragama serta dapat menerima perbedaan.

Namun demikian dibalik hangatnya hubungan antara kedua negara, terdapat suatu fakta yang sebenarnya belum banyak diketahui publik atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir, telah terjadi dinamika pasang-

---

<sup>11</sup> Rudi Candra, "Maqashid Syariah Sebagai Konsep Kepentingan Nasional dalam Politik Luar Negeri Indonesia," in *Diskursus Soal Islam, Politik, dan Hubungan Internasional* (Depublish, 2020).

<sup>12</sup> Mr. Ahmed, "The Embassy of Egypt in Jakarta," (2019).

<sup>13</sup> Muhammad Murtadlo, "Egypt Indonesia Relationship For Modernization of Islamic Education," *Jurnal Al-Qalam* 24, No. 2 (2018).

<sup>14</sup> Usman Syihab, *Rekaman Pengalaman Diplomasi Lunak Indonesia di Bumi Para Nabi Tahun 2016-2020*, (Kairo: Pusat Kebudayaan Indonesia KBRI, 2022).

surut perubahan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia itu sendiri, yang terjadi dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir ini pernah berada pada titik yang sangat kuat atau ideal yaitu pada masa Soekarno. Mesir selalu menjadi perhatian bagi Indonesia serta prioritas bagi terselenggaranya politik luar negeri Indonesia khususnya di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi yang lain juga pernah mengalami situasi pada titik yang begitu rendah dan memprihatinkan yaitu pada era kepemimpinan Presiden Soeharto di mana pada masa itu arah kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih mengarah terhadap kekuatan barat sehingga menjadikan Mesir kurang dipandang signifikan bagi hubungan luar negeri Indonesia. Sehingga politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya terhadap Mesir menjadi kurang tergarap dengan baik kala itu.

Walaupun terdapat dinamika pasang surut dari periode kepemimpinan Presiden Indonesia, akan tetapi kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Mesir menjadi sebuah tradisi dalam politik luar negeri Indonesia yang terstruktur dan berjalan sangat intensif. Sejarah mencatat bahwa semua Presiden RI pernah mengunjungi Mesir.<sup>15</sup> Soekarno menjadi Presiden Indonesia yang paling banyak mengunjungi Mesir yaitu enam kali, pada tahun 1955, 1958, 1960, 1961, 1964 dan 1965.<sup>16</sup> Soeharto, Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono, masing-masing sebanyak dua kali sedangkan Megawati hanya satu kali.<sup>17</sup> Hanya pada era Presiden Habibie tidak melakukan kunjungan ke Mesir karena masa jabatan yang sangat singkat serta faktor situasi dalam negeri Indonesia yang tidak kondusif. Akan tetapi Habibie pernah mengunjungi Mesir saat menjabat sebagai Menteri di era Soeharto.

---

<sup>15</sup> Arsip Nasional RI, "Masa Jabatan Presiden Habibi Paling Singkat," (2015).

<sup>16</sup> AM. Fachir, "Jauh di Mata Dekat di Hati. Potret Hubungan Indonesia Mesir" (2009).

<sup>17</sup> Abdurrahman Mohammad Fachir, "Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Resiprositas" (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015).



Pada tanggal 20 Oktober 2014 saat Joko Widodo-Jusuf Kalla secara resmi disahkan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia<sup>18</sup> beberapa media televisi di Indonesia menyebutkan bahwa salah satu isu yang dinantikan adalah pada ranah politik luar negerinya. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa Joko Widodo yang datang menuju kursi kepresidenan memiliki latar belakang yang berbeda dari presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana diketahui bahwa Joko Widodo bukanlah seorang yang beralatar belakang militer serta sebagai ketua umum partai, bukan juga berasal dari keluarga yang berpengaruh di Indonesia.<sup>19</sup> Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) politik luar negeri Indonesia telah menunjukkan sikap yang mencerminkan kekuatan sebagai negara *middle power* yang secara aktif terlibat dalam berbagai forum di level internasional.<sup>20</sup> Joko Widodo nampak kurang begitu memiliki antusias yang tinggi untuk berperan lebih aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri di berbagai event internasional.<sup>21</sup>

Menurut Aaron L Conelly, Joko Widodo dianggap sebagai orang baru dalam urusan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan latar belakang seorang individu dalam konteks kepemimpinan negara menjadi faktor yang mempengaruhi bagi arah kebijakan luar negeri yang akan diambilnya serta bagaimana pengambilan keputusan dalam skala domestik maupun internasional.<sup>22</sup> Sementara itu Aleksius Jemadu mengatakan, ketika Joko Widodo menggantikan kepemimpinan SBY di tahun 2014, Joko Widodo dinilai cenderung

---

<sup>18</sup> Odelia Sinaga, "Foreign Officials Attend Joko Widodo-JK's Inauguration," *Tempo*, 2018, <https://en.tempo.co/read/615708/foreign-officials-attend-joko-widodo-jks-inauguration>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

<sup>19</sup> Burhanuddin Muhtadi, "Joko Widodo's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics," *Journal International Indonesian Economics Studies* 51, No. 3 (2015).

<sup>20</sup> Donald E. Wetherbee, "Indonesia's Foreign Policy in 2016: Garuda Hovering," *Southeast Asia Affairs*. ISEAS, 2017.

<sup>21</sup> Vrameswari Omega Wati, "Indonesia's Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action?," *Global Strategis*, 2021.

<sup>22</sup> Aaron L. Connelly, "Indonesian Foreign Policy Under President Joko Widodo," *Lowy Institute for International Policy*, 2014.

lebih melakukan penekanan pada pencapaian prioritas kebijakan domestiknya dari pada melakukan kegiatan internasionalnya. Joko Widodo memutuskan untuk menggunakan politik luar negeri sebagai instrumennya guna mencapai tujuan nasionalnya.<sup>23</sup> Joko Widodo juga cenderung dianggap pragmatis dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Pertimbangan untung rugi, dengan siapa Indonesia akan membangun relasi, menjadi kecenderungan dalam sikap kebijakan luar negerinya.<sup>24</sup>

Kemana arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo menjadi penting untuk dikaji. Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia harus dapat memainkan peran yang signifikan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat Islam di dunia.<sup>25</sup> Eksistensi umat Islam di Indonesia sampai hari ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting negara-negara Islam di Timur Tengah yang dinilai telah memberikan kontribusi dalam gerakan kebangkitan Islam di Indonesia.<sup>26</sup> Sementara itu peran politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah sejak tahun 1945 sampai saat ini juga terus aktif dilakukan. Indonesia senantiasa melakukan upaya untuk mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina serta sebagai pembawa misi perdamaian di kawasan Timur Tengah.<sup>27</sup> Pada masa pemerintahan Joko Widodo di periode pertama, Indonesia telah berhasil mendirikan Konsul Kehormatan (*Honorary Consul*) sebagai representative Indonesia di Ramallah,

---

<sup>23</sup> Aleksius Jemadu and Floranesia Lantang, "Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in The Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono And Joko Widodo," *Journal of ASEAN Studies* 9, No. 2 (2021).

<sup>24</sup> Didik J. Rachbini and Dwi Ardhanariswari Sundrijo, "Evaluasi Politik Luar Negeri Indonesia & Perubahan Ekonomi Global" (LP3ES, 2020).

<sup>25</sup> Fuadi Pitsuwan, "Indonesia's Foreign Policy and the International Politics of the Islamic World," *The Indonesian Quarterly* 40, No. 4 (2012).

<sup>26</sup> Istadiyantha, "Reinterpreting the Indonesia's Relations with the Middle East towards the Era of Society 5.0," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, No. 1 (2021).

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia's Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond* Jakarta: Palgrave Macmillan, 2015.

yang merupakan kiprah besar bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah.<sup>28</sup>

Menurut Rizky Aliv Alfian kehadiran Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 2014 telah membawa perubahan dalam pandangan politik luar negeri Indonesia dari orientasi ke luar (*outward looking*) di masa SBY menjadi orientasi ke dalam (*inward looking*).<sup>29</sup> Sehingga adanya perubahan pandangan kebijakan luar negeri Joko Widodo *inward looking* juga dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negerinya terhadap Mesir.<sup>30</sup> Dalam urusan politik luar negeri Indonesai terhadap Mesir setelah jatuhnya Hosni Mubarak dari kursi kepemimpinan, kondisi dan situasi politik di Mesir mengalami perubahan. Pergantian rezim pemerintahan silih berganti dari Hosni Mubarak, Mursi dan Al Sisi,<sup>31</sup> kondisi politik domestik Mesir pasca pemerintahan Hosni Mubarak yang belum sepenuhnya stabil disikapi oleh Indonesia dengan melakukan penyesuaian kebijakan luar negerinya terhadap Mesir. Transformasi kebijakan ini dilakukan karena adanya aspek kepentingan nasional Indonesia pada masa itu.

Menurut Istadiyantha, Indonesia-Mesir dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah memiliki hubungan yang begitu dekat Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan identitas sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim di dunia. Kesamaan identitas agama Islam dan hubungan yang begitu dekat menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia untuk dapat mengaktualisasikan kepentingannya di Mesir dan di kawasan Timur Tengah. Menurut

<sup>28</sup> Azyumardi Azra, *Melacak Pengaruh dan Pergeseran Orientasi Tamatan Kairo*, Jakarta: LP3ES, 1999.

<sup>29</sup> Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhana, "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, No. 1 (2018): 152–68.

<sup>30</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1992).

<sup>31</sup> صرية - البراية خال عهد الرئيس عبد الفتاح العالقات السياسية ا. إبراهيم يوسف عبيد السيسى

والاقتصادي والسياسي الستراتيكي المركز العربي الديمقراطي للدراسا م. ٣١٠٢-٣١٠٢  
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد-العاشر-أغسطس-أب-سنة ٢٠١٨. برلين-المانى

Christophe Dorigné Thomson dalam penelitiannya menyatakan Benua Afrika menjadi preferensi bagi pemerintahan Joko Widodo dalam kebijakan luar negerinya saat ini. Pada tahun 2018 Joko Widodo membentuk *Indonesian African Forum* (IAF) sebagai perhimpunan dalam program diplomasi ekonomi dengan negara-negara di kawasan tersebut.

IAF merupakan kerangka atau wadah kerjasama bagi Indonesia dan negara-negara di benua Afrika. Kedua belah pihak, Indonesia dan Afrika telah menyepakati bahwa adanya forum ini digunakan sebagai forum untuk mengoptimalkan kembali peran Indonesia di benua Afrika serta memperkuat diplomasi ekonomi dan perdagangan di kawasan tersebut. IAF merupakan forum yang mempertemukan beberapa unsur penting yaitu dari pemerintah, pebisnis, serta para pemangku kebijakan Indonesia-Afrika guna menjajaki potensi kerjasama ekonomi, dan memperkuat kerjasama yang sudah terjalin selama ini, apalagi Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan relasi sejak lahirnya KAA di Bandung. Dengan melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Istadiyantha dan Christophe Dorigne Thomson bahwa hubungan Indonesia, Mesir dinilai sangat dekat dan memiliki kesamaan identitas sehingga menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam melaksanakan kepentingannya di Mesir, selanjutnya juga disampaikan bahwa benua Afrika telah menjadi perhatian bagi politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo.

Adanya transisi pemerintahan di Indonesia dari SBY menuju Joko Widodo telah membawa perubahan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo ternyata koheren dengan perubahan kebijakannya terhadap Mesir. Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Joko Widodo, kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir memiliki dimensi yang berbeda dari para presiden pendahulunya. Intensitas kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014-2024 khususnya di kawasan Timur Tengah dapat dijadikan indikator ke mana arah kebijakan luar negerinya tersebut. Joko Widodo sendiri sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia dari Oktober tahun 2014,

belum pernah mengunjungi Mesir.<sup>32</sup> Hal ini berbeda dengan para presiden sebelumnya. Sebuah tanda tanya besar bagi kita semua dan sebagai fenomena baru yang tidak seperti biasanya terjadi khususnya dalam konteks politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir.

Dari data yang peneliti himpun, Joko Widodo diketahui melaksanakan kunjungan resmi pertamanya di kawasan Timur Tengah pada tahun 2015. Saat itu Mesir tidak termasuk dalam agenda kunjungannya. Ia melakukan kunjungan kenegaraannya di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE dan Qatar.<sup>33</sup> Sementara itu pada tahun yang sama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi justru menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan pertama dalam kunjungan resminya.<sup>34</sup> Kunjungan Al-Sisi ke Indonesia menurut Duta Besar Mesir untuk Indonesia di Jakarta merupakan suatu kunjungan yang tidak biasa, tetapi kunjungan yang luar biasa dan bersejarah. Kunjungan Al-Sisi juga menjadi kunjungan pertama setelah 32 tahun dari Presiden Mesir sebelumnya. Mesir ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia dan mengajak kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan investasi.<sup>35</sup>

Ketidakhadiran Joko Widodo ke Mesir hingga disertai ini disusun semakin mempertanyakan kembali peran penting Mesir di kawasan Timur Tengah bagi Indonesia khususnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Fakta sejarah mencatat bahwa semua Presiden Indonesia mengunjungi Mesir, jasa besar Mesir sebagai

---

<sup>32</sup> Ima Parlina and Tama Salim, "President Joko Widodo Kicks off Middle East Tour," Jakarta Post, 2015, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/12/president-joko-widodo-kicks-middle-east-tour.html>. 2015.

<sup>33</sup> Humas Sekretaris Kabinet Presiden Joko Widodo, "President Joko Widodo Begins Working Visit to Three Middle East Countries," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015, <https://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-begins-working-visit-to-three-middle-east-countries/>.

<sup>34</sup> Eslam Deif, "President Al-Sisi Agrees to 'Fight Terrorism' with Indonesian Counterpart," Daily News Egypt, 2015, <https://dailynewsegypt.com/2015/09/05/president-al-sisi-agrees-to-fight-terrorism-with-indonesian-counterpart/>.

<sup>35</sup> سفير مصر في جاكارتا: زيارة السيسي لاندونيسيا تاريخية ومهمة. <https://www.almasryalyoum.com/news/details/804378>

negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, adanya transformasi nilai-nilai Wasityyah dari Al-Azhar ke Indonesia, serta adanya hubungan di bidang politik, budaya, pendidikan dan keagamaan bagi kedua negara yang berjalan begitu harmonis dan saling membutuhkan. Apakah Joko Widodo tidak menyadari akan hal tersebut? padahal itu penting. Tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir juga bisa menjadi kerugian tersendiri bagi Indonesia. Resiko diplomatik yang diterima bagi kedua negara menjadi semakin besar dalam menentukan arah hubungan bilateral di masa yang akan datang. Absennya Joko Widodo dalam kunjungan ke Mesir juga dapat peneliti asumsikan sebagai tindakan yang tidak mengedepankan “*reciprocity*” kepada Mesir yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar Indonesia serta kepada Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi yang sudah datang ke Indonesia pada tahun 2015.

Selain itu, dalam konteks politik luar negeri Indonesia, tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir juga telah mengubah tradisi lama yang sudah terstruktur dari Presiden Indonesia sebelumnya yang senantiasa mengunjungi Mesir. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah memberikan catatan tersendiri serta *alert* peringatan terhadap praktik kebijakan luar negeri bagi pemerintah Indonesia di era Joko Widodo khusus dalam kaitannya terhadap Mesir. Selanjutnya tanda-tanda ketidakpastian dalam isu besar di tingkat kepala negara juga semakin menandakan bahwa terdapat alasan lain yang diyakini sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh Joko Widodo secara individu dengan tidak melakukan kunjungan ke Mesir menjadi semakin menarik untuk diteliti.

Melalui bacaan dan pengamatan dari penelitian terdahulu, disertai ini berangkat dari sebuah fakta baru dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia-Mesir, yaitu kenapa kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir mengalami perubahan pada masa Joko Widodo dengan tidak melakukan kunjungan ke Mesir sebagaimana yang dilakukan presiden sebelumnya. Tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir menjadi sebuah masalah baru dalam praktek kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir yang sepertinya



belum dibahas dalam diskusi-diskusi akademik maupun dalam penelitian terdahulu.

Praktek kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir di era kepemimpinan Joko Widodo tidak lagi menjalankan tradisi yang sudah terstruktur dari presiden terdahulu. Pergeseran kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir tersebut dapat diidentifikasi menjadi beberapa hal yakni seperti tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir sebagaimana yang dilakukan oleh presiden pendahulunya hingga prioritas kebijakan politik luar negeri Joko Widodo mengenai diplomasi ekonomi dan penguatan kerjasama dengan negara-negara ekonomi baru seperti UAE, Arab Saudi dan Tiongkok.

Fenomena ini sekaligus menjadi suatu hal yang *unprecedented* dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya, adanya fakta baru yang peneliti temukan mengenai Joko Widodo yang belum berkunjung ke Mesir juga dapat membuktikan bahwa argumentasi yang menyatakan kedekatan hubungan bilateral Indonesia-Mesir serta prioritas kebijakan luar negeri terhadap negara-negara di wilayah Afrika/Timur Tengah yang disampaikan dalam penelitian sebelumnya oleh Istadiyantha dan Thomson menjadi kurang sempurna. Bagaimanapun juga kunjungan seorang pemimpin negara ke negara sahabat merupakan suatu tolok ukur dalam membangun dan meningkatkan hubungan sebuah negara. Oleh sebab itu berdasarkan dari pemaparan yang sudah diuraikan di atas, peneliti memandang bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia-Mesir pada era kepemimpinan Joko Widodo menjadi sebuah persoalan yang penting untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Kenapa terjadi pergeseran kebijakan politik luar negeri pada masa kepemimpinan Joko Widodo dibandingkan dengan para presiden sebelumnya yang berhubungan dengan Mesir.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir di masa kepemimpinan Joko Widodo?

2. Kenapa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya terhadap Mesir di era Joko Widodo berbeda dibandingkan dengan presiden sebelumnya?
3. Apa saja yang menjadi latar belakang Joko Widodo tidak melakukan kunjungan ke Mesir dan pertimbangan-pertimbangan apakah yang mempengaruhi kebijakan Joko Widodo tersebut ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan, menyelidiki, dan menganalisis dinamika kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir di era kepemimpinan Joko Widodo, termasuk alasan mengapa kebijakan tersebut berbeda dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Penelitian ini juga mendalami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan Joko Widodo untuk tidak melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir, serta berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Signifikansi Penelitian dalam Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran atau perubahan pola kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Joko Widodo tidak melanjutkan tradisi politik luar negeri sebelumnya yang menjadikan Mesir sebagai negara prioritas, termasuk dengan tidak melakukan kunjungan kenegaraan yang selama ini dilakukan oleh presiden-presiden RI terdahulu.

Di era Joko Widodo, Mesir tidak lagi dipandang sebagai mitra strategis dalam kerangka kerja sama ekonomi dan investasi. Ketidakhadiran Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan ke Mesir merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini juga menemukan model baru kebijakan luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo, yang lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan bisnis melalui penguatan kolaborasi dengan negara-negara seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.



Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Joko Widodo untuk tidak mengunjungi Mesir sejak periode pertama hingga akhir masa jabatannya. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) Situasi domestik Mesir pasca pergolakan Arab Spring yang hingga kini masih berjuang dalam proses pemulihan ekonomi. (2) Pertimbangan kognitif (psikologis) Joko Widodo terhadap informasi dan persepsinya mengenai situasi di Mesir. (3) Karakter kepemimpinan dan latar belakang individu Joko Widodo, yang berasal dari dunia bisnis, sehingga lebih berorientasi pada hasil ekonomi konkret.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya hubungan Indonesia-Mesir. Selama ini, hubungan kedua negara sering kali dinarasikan sebagai harmonis dan stabil dari waktu ke waktu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di era Joko Widodo (2014–2024), intensitas hubungan bilateral Indonesia-Mesir mengalami penurunan yang signifikan. Ketidakhadiran Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan menjadi indikasi adanya perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir dibandingkan dengan era presiden-presiden sebelumnya.

Penelitian ini menawarkan pendekatan kritis dengan tidak hanya memandang hubungan Indonesia-Mesir secara normatif, tetapi juga mengkaji secara mendalam perubahan yang terjadi di era Joko Widodo. Perubahan ini terlihat nyata, terutama dengan tidak adanya kunjungan kenegaraan ke Mesir dan bergesernya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak lagi menjadikan Mesir sebagai mitra utama.

Penelitian ini juga memberikan sudut pandang baru mengenai posisi Indonesia dalam konteks politik luar negeri di kawasan Timur Tengah di bawah kepemimpinan Joko Widodo, yang lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara kaya di kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Tiongkok.

Disertasi ini secara praktis diharapkan mampu menjawab permasalahan dan menjelaskan perubahan dalam kebijakan politik

luar negeri Indonesia terhadap Mesir. Temuan ini memberikan kontribusi bagi literatur yang membahas hubungan bilateral Indonesia-Mesir di masa Joko Widodo, yang sebelumnya belum banyak dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam konteks politik luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, terutama terhadap Mesir, baik di era Joko Widodo maupun pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

#### **D. Kajian Pustaka**

Studi yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Mesir dan politik luar negeri Indonesia Mesir di kawasan Timur Tengah sudah banyak dikaji dari berbagai aspek oleh para akademisi, akan tetapi mengingat dinamika dalam politik luar negeri Indonesia dan hubungan internasional di Timur Tengah lebih khusus terhadap Mesir, masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Abdurrahman M. Fachir menguraikan penelitiannya dengan judul “Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Tentang Teori Resiprositas”. Menurut Abdurrahman M. Fachir terjadi ketimpangan hubungan antara Indonesia Mesir yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sejarah yang memposisikan Mesir sebagai negara superior dengan ikon Al-Azhar sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam, ditambah lagi dengan tingginya kuantitas mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir dan besarnya hutang budi masyarakat Indonesia kepada Al-Azhar Mesir. Selain dilihat dari faktor sejarah, terjadinya ketimpangan hubungan Indonesia- Mesir juga dapat dilihat dari kuantitas formasi perwakilan dan intensitas kunjungan kenegaraan. Menurut penulis, penelitian di atas mendeskripsikan hubungan Indonesia-Mesir dari satu aspek saja,

padahal dalam aspek hubungan lain seperti keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, justru menunjukkan adanya relasi yang sangat kuat antara Indonesia dan Mesir. Selanjutnya jika dilihat dari periodisasi, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010 yaitu di masa SBY. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah pada masa kepemimpinan Joko Widodo yang sepertinya belum pernah dilakukan penelitian.

Berbeda dari apa yang diuraikan oleh Abdurrahman M. Fachir, menurut Rudi Candra dalam penelitiannya dengan judul *Peran People to People Diplomacy; Menelisik Fungsi Soft Power dalam Hubungan Kedua Negara tahun 1998-2011* bahwa sesungguhnya hubungan antara Indonesia dengan Mesir berjalan dengan baik. Dalam pandangan kelompok realis walaupun negara selalu dianggap sebagai aktor yang sangat ideal dan penting dalam membangun hubungan diplomatik suatu negara, akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi dan masifnya arus globalisasi, aktor-aktor dalam hubungan internasional pun mulai mengalami perkembangan dan transformasi. Peran (*non-state actor*) dinilai menjadi sangat signifikan dalam hubungan internasional antara Indonesia Mesir saat ini.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rudi Candra dengan tema seperti di atas, menurut peneliti lain Aprilia Restuning Tunggal dalam penelitiannya yang berjudul *Indonesia-Egypt Diplomacy: Darussalam Gontor and Al-Azhar University* memiliki unsur kesamaan dalam aktor *non-state*. Dalam temuan penelitiannya tersebut disampaikan bahwa hubungan Indonesia Mesir dari awal kemerdekaan Indonesia sampai hari ini berjalan dengan sangat baik dan memberikan kontribusi nyata melalui model kerjasama dalam bidang pendidikan dan kepesantrenan. Hal ini dapat dilihat adanya transformasi nilai-nilai keislaman dari Universitas Al-Azhar ke Pondok Modern Gontor. Diantaranya adalah ilmu wakaf, paradigma Islam Wasatiyyah dan Islam Moderat, serta konsep pendidikan Islam.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Murtadlo menyebutkan Mesir memiliki peran yang begitu besar dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Hubungan kedua negara sudah berjalan dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya, hal ini dapat dilihat dari

sejarah hubungan dengan sejarah Nusantara yang diperkirakan terjadi beberapa ribu tahun silam yaitu ketika orang-orang Mesir yang memakai kapur dari Barus di pulau Sumatra sebagai salah satu bahan pengawet mumi. Kuatnya hubungan antara dua negara memberikan pengaruh terhadap modernisasi pendidikan di Indonesia. Bentuk pendidikan Mesir yang modern dan wasathiyah dianggap memiliki kesesuaian dengan masyarakat dan budaya Indonesia yang multikultural. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan antara Indonesia Mesir sebagaimana yang disampaikan oleh A.M. Fachir pada penelitian terdahulu.

Christophe Dorigné Thomson juga memperkuat pendapat dari Muhammad Murtadlo serta argumentasi peneliti saat ini. Dalam penelitiannya berjudul *Indonesia's African Foreign Policy Shift under President Joko Widodo* bahwa kawasan Afrika menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia di periode Joko Widodo. Oleh sebab itu pada tahun 2018 Indonesia berhasil membentuk Forum Indonesia Afrika (IAF) yang dilaksanakan di Bali. Forum ini digunakan sebagai wadah dalam menjalankan kerangka diplomasi ekonomi dengan negara-negara di benua Afrika. Joko Widodo juga mengatakan bahwa sejarah Konferensi Asia-Afrika di Bandung dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berbisnis.<sup>36</sup>

Istadiyantha juga turut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Murtadlo dan Christophe. Penelitian Istadiyantha, yang berjudul *Reinterpreting Indonesia's Relations with the Middle East towards the Era of Society 5.0* menguraikan bahwa hubungan Indonesia Mesir serta negara-negara di Timur Tengah begitu dekat. Negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Muslim di dunia, memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang lebih humanis. Kesamaan identitas agama Islam serta sejarah hubungan yang dekat

---

<sup>36</sup> Christophe Dorigné-Thomson, "Indonesia's African Foreign Policy Shift under President Joko Widodo," *The Asian Institute of Research. Journal of Social and Political Sciences* 4, No. 3 (2021).

dengan Mesir, Arab Saudi dan beberap negara Arab lainnya menjadi kekuatan yang dapat diaktualisasikan.<sup>37</sup>

Sementara untuk tema yang lebih spesifik membahas mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dapat ditemukan dari artikel yang diteliti oleh Deasy Silvyia Sari dengan judul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak*. Penelitian ini memperkuat argumentasi peneliti saat ini. Pasca jatuhnya Hosni Mubarak situasi politik Mesir mengalami perubahanyang terjadi begitu singkat dari Hosni Mubarak, Mursi dan Al Sisi. Terjadinya perubahan politik di Mesir pasca pemerintahan Hosni Mubarak, disikapi oleh Indonesia dengan melakukan penyesuaian kebijakan luar negerinya terhadap Mesir. Transformasi kebijakan dilakukan karena adanya aspek kepentingan nasional Indonesia, yaitu keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Mesir, eksistensi program-program pendidikan, dan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Selanjutnya penelitian tentang Islam dan politik luar negeri Indonesia diteliti oleh Kevin W. Fogg dengan judul *Islam in Indonesia's Foreign Policy 1945-1949*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan negara Arab memiliki kedekatan identitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Istahdiyantha dalam penelitiannya. Meskipun mayoritas para pemerhati kebijakan luar negeri Indonesia mengatakan tidak adanya pengaruh Islam dalam kebijakan luar negeri, namun di awal setelah kemerdekaan RI justru memperlihatkan adanya pengaruh Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa itu Islam dijadikan sebagai unsur utama dalam menjalankan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab dari 1945-1949.<sup>38</sup>

Penelitian selanjutnya terkait dengan tema politik luar negeri Indonesia pada masa Joko Widodo ditulis oleh Ludiro Madu yang berjudul *Indonesia's Foreign Policy Under President Joko Widodo*:

---

<sup>37</sup> Istadiyantha, "Reinterpreting the Indonesia's Relations with the Middle East towards the Era of Society 5.0."

<sup>38</sup> Kevin W. Fogg, "Islam in Indonesias Foreign Policy, 1945-1949," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, No. 2 (2015).

*More Domestic and Nationalist Orientations*. Dalam artikel ini arah penelitian ditekankan pada orientasi politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo dengan di era SBY. Terdapat perbandingan antara politik luar negeri di era pemerintahan SBY yang lebih mengedepankan citra bangsa Indonesia dalam masyarakat internasional dengan kebijakan yang diterjemahkan dengan istilah *million friends and zero enemy*, sedangkan dalam pemerintahan Joko Widodo politik luar negeri RI lebih berorientasikan kepada kepentingan nasional seperti ekonomi dan poros maritime dunia.<sup>39</sup> Tulisan yang disampaikan oleh Ludi Madu di atas belum menguraikan secara khusus politik luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo terhadap Mesir.

Aaron L. Connelly dalam artikelnya dengan judul *Indonesian Foreign Policy under President Joko Widodo* memperkuat dan melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Ludi Madu. Dalam pandangan Aaron L. Connelly Joko Widodo dinilai sebagai orang baru dalam praktik diplomasi. Joko Widodo dianggap tidak memiliki pandangan yang kuat tentang tempat Indonesia di dunia. Beliau mendeskripsikan bahwa Joko Widodo sebagai seorang reformasi domestik yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur, melawan korupsi, yang memungkinkan jika ini dapat dijalankan dengan baik akan dapat memainkan peran Indonesia yang jauh lebih besar dalam urusan dunia.<sup>40</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ludi Madu, penelitian ini juga belum menguraikan secara khusus tentang politik luar negeri Indonesia di masa Presiden Joko Widodo terhadap Mesir.

Sejalan dengan pendapat Aaron L. Connelly, Muhammad Rosyidin dalam penelitiannya yang berjudul *Regionalism under Challenge: Ideas And Joko Widodo's Foreign Policy Towards Asean, 2014-2019* juga menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Joko

---

<sup>39</sup> Ludi Madu, "Indonesia's Foreign Policy under President Joko Widodo: More Domestic and Nationalist Orientations," *International Journal of Scientific Research in Science and Technology* 3, No. 1 (2017).

<sup>40</sup> Connelly Aaron L, "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges," *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 37, No. 1 (2015).



Widodo dalam hal ASEAN pada tahun 2014-2019 memiliki perbedaan yang signifikan dari presiden sebelumnya. Dapat dilihat melalui peran Indonesia di ASEAN yang dinilai mengalami penurunan, terutama pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo.<sup>41</sup> Walaupun dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Rosyidin terdapat periode yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, namun secara lebih khusus politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir di masa Joko Widodo belum dijabarkan dalam penelitiannya.

Berikutnya penelitian tentang politik luar negeri Indonesia sebelum periode Joko Widodo, yaitu di era Soeharto, Gusdur dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian politik luar negeri Indonesia di era Gusdur ditulis oleh Anthony L. Smith dengan judul *Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?*<sup>42</sup> Politik Luar Negeri pada masa Gus Dur dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan internasional seperti ketika menangani situasi Timor Timur pasca terjadinya referendum. Arah *foreign policy* yang lebih dekat mengarah ke Tiongkok serta warisan dari rezim sebelumnya saat Indonesia mengalami krisis moneter yang memberi dampak di berbagai sektor menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Gus Dur pada waktu itu. Sedangkan kaitannya dengan Timur Tengah, Gus Dur ingin mempertimbangkan adanya hubungan diplomatik serta pengakuan terhadap Israel. Gus Dur berpendapat dengan mengakui Israel, Indonesia akan mampu lebih berpengaruh dalam negosiasi atas negara Palestina.

Senada dengan penelitian yang disampaikan Anthony L. Smith. Leo Suryadinata juga menguraikan bahwa Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar dengan prosentase 87% namun dalam realitas politik luar negerinya dengan negara-negara Timur

---

<sup>41</sup> Mohammad Rosyidin, "Regionalism under Challenge: Ideas and Joko Widodo's Foreign Policy Towards Asean, 2014-2019," *Journal of ASEAN Studies* 8, No. 2 (2020): 147–72.

<sup>42</sup> Anthony L Smith, "Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?," *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 22, No. 3 (2002).

Tengah tidaklah begitu dekat. Hal ini disebabkan karena letak pengambilan kebijakan luar negeri dengan negara-negara Timur Tengah tidak didasarkan pada Islam, tetapi pada perhitungan kepentingan nasional. Salah satu alasannya adalah rezim pada waktu itu sangat fobia terhadap fundamentalisme Islam.<sup>43</sup>

Selanjutnya, penelitian yang mencocokkan antara kebijakan luar negeri di masa kepemimpinan SBY dan Joko Widodo datang dari Aleksius Jemadu dan Florensia Lantang dengan judul *Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in The Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo*. Aleksius mengungkapkan bahwa kedua presiden ini dianggap memiliki konseptualisasi yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya. Menurutnya Susilo Bambang Yudhoyono cenderung membuat kepemimpinan internasional Indonesia sebagai bagian penting dari upaya kerasnya untuk membangun identitas pasca-otoriter untuk negara yang demokratis dan stabil, sedangkan Joko Widodo lebih memilih menjadikan politik luar negerinya mengabdikan pada pencapaiannya di ranah domestik.<sup>44</sup>

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul *Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring* yang ditulis oleh Ahmad Sahide dan Rezki Satris. Penelitian tersebut membahas mengenai kegagalan demokrasi yang dialami Mesir pasca terjadinya peristiwa Arab Spring yang disebabkan beberapa faktor. Pertama faktor internal yaitu faktor ketidaksiapan Mesir sendiri dalam berdemokrasi. Kemudian faktor eksternal yang disebabkan adanya intervensi asing yang memiliki kepentingan nasional dengan Mesir. Mesir semestinya belajar dari Indonesia dalam hal berdemokrasi. Hubungan dekat antara kedua negara dan Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia

---

<sup>43</sup> Leo Suryadinata, "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia," *University of California Press* 35, No. 3 (1995).

<sup>44</sup> Jemadu and Lantang, "Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in The Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo."



yang berhasil mengkonsolidasikan demokrasi sejak 1998 menjadi alasan yang tepat.<sup>45</sup>

Terdapat berbagai kajian empiris yang telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan praktisi mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo dan kaitannya terhadap Mesir. Dari hasil pencarian yang sudah dilakukan, penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari era Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Penelitian terdahulu yang sudah ada sebatas meneliti pada hubungan Indonesia-Mesir sampai pada tahun 2010. Demikian juga, penelitian terdahulu masih sebatas pada perubahan kebijakan politik luar negeri Joko Widodo secara umum yang berbeda dari presiden sebelumnya. Selain itu penelitian sebelumnya masih banyak mengulas orientasi dan perbedaan pengambilan kebijakan luar negeri Joko Widodo yang bukan menggunakan pendekatan pertimbangan kognitif individu seorang presiden. Hasil penelitian terdahulu menjadi dasar penting untuk ditelusuri lebih lanjut terkait perubahan dalam kebijakan politik luar negeri Joko Widodo yang turut memberikan dampaknya dalam kaitannya terhadap Mesir. Mengingat sejumlah penelitian terdahulu juga belum ada yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari aspek pendekatan psikologis (kognitif). Dengan demikian penelitian ini mengisi kesenjangan (*research gap*) penelitian sebelumnya dengan penambahan pendekatan psikologis dalam kebijakan luar negeri sebagai pisau analisisnya.

Dalam ruang kosong inilah, penelitian ini mampu menghadirkan sumbangsih wacana dan diskursus dalam politik moderasi beragama antara Al-Azhar dengan Indonesia serta mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo terhadap Mesir. Selama ini Mesir dinarasikan sebagai kawasan yang menjadi prioritas, strategis dan memiliki hubungan yang sangat dekat sebagai upaya dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo. Akan tetapi dalam realitanya, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir telah mengalami perubahan dan pergeseran. Joko Widodo lebih

---

<sup>45</sup> Ahmad Sahide and Rezki Satris, "Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring," *Jurnal Sosial Politik* 7, No. 2 (2021).

aktif dalam melakukan intensitas bilateral melalui kunjungan kenegaraan dan membangun relasi kerjasama dengan negara-negara Arab Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi serta negara Tiongkok dibandingkan dengan Mesir. Selain itu dari sisi intensitas bilateral Indonesia-Mesir saat ini juga terbilang cukup rendah, tidak seperti pada periode presiden sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)**

Istilah *Foreign Policy* dimaknai sebagai seperangkat keputusan yang menjadi panduan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. *Policy* sendiri berasal dari konsep pilihan (*choise*) yang memiliki makna “*mengambil tindakan atau membuat keputusan-keputusan guna mencapai suatu tujuan, sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep wilayah akan membantu dalam memahami konsep luar negeri (foreign). Kedaulatan berarti otoritas terhadap wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga politik luar negeri (foreign policy) dimaknai sebagai seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara*”.<sup>46</sup>

Mengutip pendapat dari Jack C. Plano, kebijakan luar negeri dimaknai sebagai “*suatu strategi tindakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan dalam suatu negara untuk menghadapi negara lain ataupun organisasi politik internasional lainnya. Hal tersebut dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan nasional yang spesifik serta dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang sedang diperintahnya serta memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara*”.<sup>47</sup> Kepentingan nasional menjadi pedoman bagi perumusan kebijakan luar negeri serta dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan sikap politik luar negeri yang diambil oleh suatu

---

<sup>46</sup> Anak Agung Banyu Perwita and Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>47</sup> Jack C Plano and Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Bandung Abardin, 1999).

negara.<sup>48</sup> Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Robert J. Art bahwa kepentingan nasional menjadi bagian yang fundamental dalam mengartikulasikan politik luar negeri suatu bangsa.<sup>49</sup>

Dalam analisis kebijakan luar negeri, menurut Valerie Hudson terdapat dua poin penting yang menjadi level analisis kebijakan. Pertama adalah *individual decisionmaker* karakter individu dari seorang pemimpin negara di mana psikologi politik seorang pemimpin dapat menjadi penentu. Dalam keadaan yang serba dinamis dan tidak dapat diprediksi, tekanan yang tinggi serta ketidakpastian karakteristik pribadi individu akan menjadi penting dalam memahami pilihan kebijakan luar negeri. Kedua, *culture and national identity* bangsa dan karakteristik masyarakat. Dalam hal ini kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh karakter masyarakat serta produk dari proses sosialisasi bangsa.<sup>50</sup> Sedangkan kemampuan negara dalam mencapai tujuan dan segala sesuatunya bergantung pada kapasitas dan kapabilitas terhadap aktor lain dalam sistem di kawasan tersebut, diantaranya strategi dan kebijakan, kemampuan individu seorang dalam mengambil keputusan, serta situasi dan kondisi dalam negeri maupun luar negeri.<sup>51</sup>

Selanjutnya terdapat dua unsur yang saling berinteraksi dalam politik luar negeri suatu negara, yaitu *keajegan* (tetap) dan perubahan. Ganewati Wuryandari menjelaskan “yang termasuk dalam unsur *keajegan* dalam politik luar negeri adalah nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat di negara tersebut kemudian prinsip atau pedoman dalam bernegara yang sudah disepakati. Sedangkan untuk unsur perubahan lebih kepada persoalan strategi, prioritas dan cara-cara

---

<sup>48</sup> Joseph C Ebegbulem, “Nigeria’s National Interest and Foreign Policy: A Critical Evaluation,” *International Journal of Research in Humanities and Social Studies* 6, No. 10 (2019).

<sup>49</sup> Xiaode Yi, “Rediscovering the Transition in China’s National Interest: A Neoclassical Realist Approach,” *Journal of Current Chinese Affairs*, 2019.

<sup>50</sup> Valerie M Hudson and Benjamin S. Day, “Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory,” *Third Edition*. Rowman & Littlefield, 2020.

<sup>51</sup> Marwan Kabalan, “Structures and Qatari Foreign Policy,” *Journal Al-Muntaqa* 2, No. 2 (2019).

*memperjuangkan kepentingan nasional*”.<sup>52</sup> Lebih lanjut lagi William D. Coplin juga menguraikan, politik luar negeri sebuah negara dapat mengalami perubahan. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memahami perilaku internasional yang sangat dinamis.<sup>53</sup>

*Pertama, international context*, di mana keadaan politik internasional yang sedang terjadi dalam waktu tertentu mampu memberikan pengaruh terhadap negara untuk mengambil sikap. Menurut William terdapat tiga unsur penting dalam membahas efek *international context* terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik. *Kedua*, adalah perilaku para *decision maker*. Dalam hal ini pihak pemerintah yang mencakup eksekutif, kementerian serta lembaga negara. Tindakan pemerintah yang dipengaruhi oleh adanya persepsi, pengalaman, pengetahuan dan *individual interest* dalam pemerintahannya menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

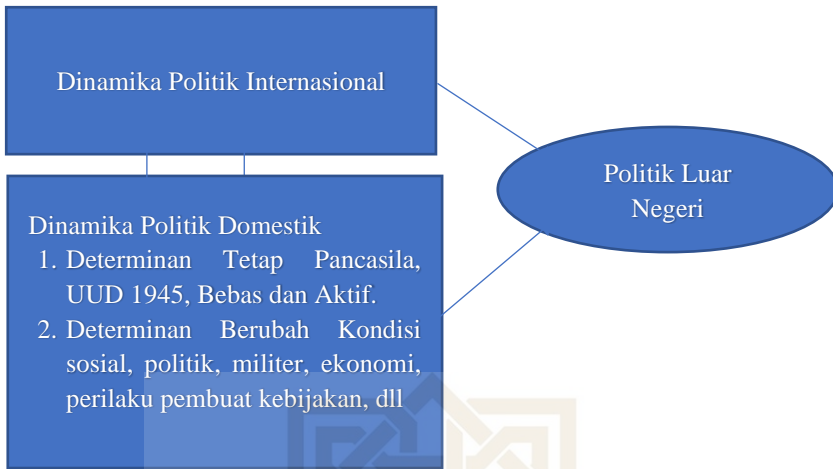
*Ketiga*, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara. Besar kecilnya kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh negara dapat memberikan pengaruhnya terhadap interaksi internasional dengan negara lain. Kekuatan ekonomi dan militer suatu negara akan menjadi pertimbangan bagi suatu negara dalam melakukan interaksi terhadap negara lain. Keempat, adalah *political domestic*. Situasi politik dalam negeri suatu negara akan memberikan pengaruhnya dalam perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan politik luar negeri.

Berdasarkan pada uraian di atas, setidaknya dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dipakai dalam politik luar negeri sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ganewati Wuryandari, “BRIN Research Professor: Two Factors Influence Indonesian Foreign Political Activism,” BRIN, 2022, <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/17/brin-research-professor-two-factors-influence-indonesian-foreign-political-activism/>.

<sup>53</sup> Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).



*Gambar 1.* Proses kerangka berfikir dalam politik luar negeri.<sup>54</sup>

Penggunaan terminologi *foreign policy* dalam konteks keindonesiaan masih menyisakan ruang untuk diskusikan secara lebih mendalam. Umumnya para akademisi hubungan internasional di Indonesia masih mengalami kebingungan dan mengansumsikan bahwa kebijakan luar negeri dan politik luar negeri adalah sebuah konsep yang berbeda, namun tidak sedikit juga dari mereka yang menganggap istilah tersebut adalah sama. Penggunaan terminologi tersebut sering dipertanyakan oleh kalangan akademisi dan pemerhati hubungan internasional itu sendiri, apakah maknanya berbeda atau sama. Oleh sebab itu sebagai pengantar dalam bab 2 ini serta kontribusi yang dapat peneliti berikan dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan hasil pencarian dari kedua istilah tersebut. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, adanya dua pandangan yang berbeda mengenai kebijakan luar negeri atau politik luar negeri menuntut peneliti untuk mencari tahu yang sebenarnya terkait terminologi *foreign policy* dalam konteks di Indonesia. Pemahaman mengenai istilah ini menjadi bagian yang sangat fundamental agar kita tidak terjebak dalam memahami penggunaan terminologi *foreign policy* itu sendiri.

<sup>54</sup> Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Ninik Rahayu, peneliti menemukan mengenai penggunaan terminologi antara kebijakan luar negeri dan politik luar negeri, khususnya di bidang ilmu hubungan internasional dan kebijakan luar negeri di Indonesia. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat di sampaikan bahwa kedua istilah tersebut merupakan hal yang sama. Kebingungan yang terjadi pada umumnya disebabkan pada pemaknaan dari istilah *foreign policy* ke dalam bahasa Indonesia.<sup>55</sup> Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan akademisi Muhammad Rosyidin salah satu pakar kebijakan luar negeri Indonesia dari Universitas Diponegoro, ia menjabarkan perihal istilah politik luar negeri dan kebijakan luar negeri adalah hal yang sama sekali tidak ada bedanya. Bagi para akademisi maupun praktisi yang masih mempersoalkan kebijakan luar negeri dan politik luar negeri adalah sesuatu yang berbeda merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena istilah tersebut adalah sama.<sup>56</sup>

Pendapat yang senada juga diperkuat oleh argumen dari Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani. Dalam sebuah karya tulisnya ia menyatakan, *foreign policy* diartikan sebagai kebijaksanaan atau seperangkat keputusan yang menjadi dasar untuk melakukan atau memilih tindakan, membuat keputusan untuk mencapai tujuan. Definisi yang dikemukakan tersebut, menjelaskan bahwa pemilihan penggunaan kata kebijakan luar negeri dan politik luar negeri dapat dipergunakan dalam memahami istilah *foreign policy*.<sup>57</sup> Dari beberapa pendapat yang sudah diuraikan di atas, dapat di simpulkan bahwa istilah kebijakan luar negeri atau politik luar negeri merupakan suatu hal yang sama, tidak ada perbedaan dari keduanya. Selama ini masih banyak dari para akademisi hubungan internasional yang menemui

---

<sup>55</sup> Ninik Rahayu, “Fungsional Diplomat Madya pada Direktur Timur Tengah” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

<sup>56</sup> Muhammad Rosyidin, “Penggunaan Terminologi Foreign Policy dalam Bahasa Indonesia” (2023).

<sup>57</sup> Anak Agung Banyu Perwita and Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017).



kebingungan dan terjebak dalam penggunaan istilah tersebut, sehingga memunculkan berbagai perdebatan serta persoalan di ranah akademis. Melalui penelitian yang saat ini sedang dilakukan, penyebutan dan penggunaan istilah *foreign policy* ke dalam bahasa yang sebelumnya masih bermakna ambigu, kini menjadi lebih gamblang. Dengan demikian, adanya penjelasan mengenai istilah *foreign policy* ke dalam bahasa Indonesia akan membantu dalam memahami kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih baik.

Selanjutnya dalam kebijakan politik luar negeri berdasarkan dari sejumlah data dan sumber penelitian terdahulu bahwa politik luar negeri sebuah negara memungkinkan untuk mengalami perubahan dan juga mengalami kesinambungan. Hal ini dapat merujuk dari pendapat Yanyan Mochamad Yani yang berargumen bahwa politik luar negeri dapat berubah sewaktu-waktu. Menurutnya, yang dimaksud dengan perubahan adalah konsep perubahan yang mengacu pada fenomena politik luar negeri yang dialami perubahan secara luas, mulai dari perubahan yang sederhana hingga kebijakan luar negeri utama yaitu adanya restrukturisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kontinuitas atau kesinambungan adalah mengacu pada pola luas dalam politik luar negeri yang cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak contoh menarik dari upaya pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya.<sup>58</sup>

Selain merujuk dari pendapat Yanyan Mochamad Yani, penjelasan mengenai perubahan dan kesinambungan dalam politik luar negeri juga dapat diperoleh dari Ganewati Wuryandari. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa kesinambungan dalam politik luar negeri dapat dijelaskan melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di negara tersebut kemudian prinsip atau pedoman dalam bernegara yang sudah disepakati. Lebih lanjut ia menjabarkan bahwa determinan yang tetap atau kontinuitas dalam hal politik luar negeri Indonesia adalah yang bersifat fundamental seperti; Pancasila, UUD 1945, dan doktrin politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan yang termasuk dalam perubahan politik luar negeri dapat diuraikan kepada

---

<sup>58</sup> Yani, "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy."

persoalan strategi, prioritas, dan cara memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini yang disebut dengan determinan berubah adalah kondisi sosial, politik, militer, ekonomi dan perilaku pengambil kebijakan.<sup>59</sup> Ia juga menambahkan bahwa konteks politik luar negeri Indonesia selalu mengalami dinamika perubahan akibat pengaruh dari lingkungan domestik dan internasional.<sup>60</sup>

Berikutnya pendapat mengenai kontinuitas dan perubahan juga datang dari Hadianto Wirajuda. Apa yang menjadi argumentasi Ganewati Wuryandari tidak jauh berbeda dengan pendapat Hadianto Wirajuda. Menurut Hadianto kebijakan luar negeri merupakan produk dari individu dalam posisi kepemimpinan. Maka dari itu, suatu kebijakan luar negeri dapat saja mengalami perubahan atau kontinuitas berdasarkan keputusan dari pemimpin, bahkan ketika di bawah kepemimpinan yang baru sekalipun, kontinuitas kebijakan luar negeri dapat saja dilakukan. Ketika kebijakan tersebut dinilai efektif serta ketika pemimpin baru menghargai dan memperhitungkan kebijakan yang sudah ada maka kebijakan luar negeri tersebut dapat dilanjutkan.<sup>61</sup> Ia menambahkan kebijakan luar negeri juga dapat mengalami perubahan ketika pemimpin baru mulai menjabat dan ketika kebijakan saat ini dianggap tidak melayani atau tidak sesuai dengan kepentingan kelompok politik yang mendukung kekuasaannya. Sejauh ini, William D. Coplin telah mengemukakan pendapatnya tentang perubahan dalam politik luar negeri yang kapan saja bisa terjadi. Adanya variable-variabel seperti *international context*, perilaku para pengambil keputusan, kemampuan ekonomi, militer dalam negara, serta kondisi politik dalam negeri suatu negara merupakan indikator yang bisa dipergunakan dalam memahami perilaku internasional yang memiliki sifat dinamis atau berubah-ubah.

---

<sup>59</sup> Wuryandari, "BRIN Research Professor: Two Factors Influence Indonesian Foreign Political Activism."

<sup>60</sup> Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*.

<sup>61</sup> Wirajuda, "The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management." dalam *Disertasi* di London School of Economics and Political Science.



## 2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Istilah rasionalitas sejatinya telah lama digunakan menjadi salah satu konsep utama dalam studi hubungan internasional. Pendekatan teori klasik dalam hubungan internasional seperti madzhab realisme dan liberalisme termasuk dalam tradisi rasionalis. Aktor negara maupun aktor selain negara (*non-state actor*) pada umumnya dianggap rasional dalam arti bahwa mereka berupaya untuk memajukan preferensi sedemikian rupa guna mencapai kepentingan mereka.<sup>62</sup>

Asumsi dasar atau konsep kunci dari teori pilihan rasional ini setidaknya dapat dilacak kembali melalui tulisan dari salah satu ilmuwan terkemuka Adam Smith yang kemudian dikembangkan oleh apa yang sekarang disebut sebagai ekonomi neoklasik. Tiga asumsi penting dari teori pilihan rasional adalah individu yang memiliki preferensi, kemudian mereka yang memaksimalkan daya guna atau *utility* itu sendiri serta individu yang bertindak secara independen.<sup>63</sup> Seorang individu yang rasional adalah individu yang mampu secara tepat mendefinisikan, menetapkan tujuan yang jelas, serta menetapkan beberapa pilihan guna mencapai tujuan. Individu mendasarkan keputusannya pada perhitungan biaya-manfaat dan memilih alternatif yang menghasilkan manfaat tinggi yang diharapkan.

Teori pilihan rasional berpandangan bagaimana sebuah keputusan itu dibuat untuk mencapai tujuan yang dianggap maksimal.<sup>64</sup> Teori pilihan rasional secara luas menjelaskan mengenai fenomena sosial, di mana tindakan yang dilakukan oleh aktor individu dalam menentukan pilihannya diartikan sebagai pilihan yang rasional. Elemen kunci dari semua penjelasan pilihan rasional adalah preferensi, keyakinan, dan batasan individu. Preferensi menunjukkan evaluasi positif atau negatif yang diberikan individu terhadap kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukan. Menurut Rafael

---

<sup>62</sup> Ji Choi Young, "Rationality, Norms and Identity in International Relations," *Macmillan Publishers Ltd. International Politics* 52, No. 1 (2015).

<sup>63</sup> Rafael Wittek, "Rational Choice Theory," EBSCO Publishing, University of Groningen, 2013. Halaman 688-690.

<sup>64</sup> Bojana Radovanović, "Rational Choice Theory and Charitable Giving," *Sociological Review* 53, No. 2 (2019).

Wittek preferensi bisa dijelaskan dengan beberapa hal, mulai dari selera makanan yang diturunkan secara budaya atau hal-hal lain dalam kebiasaan dan komitmen dari pribadi seseorang tersebut. Pilihan untung dan rugi menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap bagi aktor individu untuk mengambil pilihannya.<sup>65</sup>

Teori ini juga dikenal sebagai teori pilihan atau teori tindakan rasional, yaitu sebuah teori untuk memahami perilaku sosial dan ekonomi serta individu.<sup>66</sup> Menurut Jon Elster esensi dari teori pilihan rasional mengatakan pada saat individu dihadapkan dengan beberapa tindakan, individu tersebut biasanya melakukan apa yang mereka yakini akan memberikan hasil terbaik secara keseluruhan.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Mohtar Masoed, teori pilihan rasional menitikberatkan pada asumsi untung rugi di mana memusatkan diri terhadap individu pemerintah untuk membuat keputusan pemerintahan yang berpandangan pada keuntungan dan kerugian yang akan didapat atas keputusan yang dibuat.<sup>68</sup>

Penggunaan teori *rational choice* sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional merupakan unsur landasan bagi para pemimpin negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri serta dalam melakukan hubungan luar negeri.<sup>69</sup> Selama dua dekade terakhir, teori pilihan rasional telah dibuat sebagai terobosan ke dalam studi politik Uni Eropa, terutama melalui penerapan institusionalisme pilihan rasional untuk studi

---

<sup>65</sup> Rafael Wittek, Tom A.B. Snijders, and Victor Nee, *The Handbook of Rational Choice Social Research* (California: Stanford University Press, 2013).

<sup>66</sup> Michael I Ogu, "Rational Choice Theory: Assumptions, Strenghts, and Greatest Weaknesses in Application Outside The Western Milieu Context," *Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)* 1, No. 3 (2013).

<sup>67</sup> Jon Elster, "Social Norms and Economic Theory," *Journal of Economic Perspectives, American Economic Association* 3, No. 4 (1989).

<sup>68</sup> Yulia Rimapradesi and Ahmad Sahide, "Kepentingan Negara-negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4, No. 1 (2021).

<sup>69</sup> Ibid

pengambilan keputusan di Uni Eropa.<sup>70</sup> Studi tentang kebijakan luar negeri sebagai proses pilihan rasional sedang mengalami perubahan besar dalam fokus dan dampaknya terhadap pilihan kebijakan. Setidaknya dapat diketahui setelah berakhirnya perang dunia ke dua.<sup>71</sup> Dalam literatur lain teori pilihan rasional juga dikenal dengan istilah model rasional yang menggambarkan tindakan atau sikap dalam hubungan kebijakan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Teori ini digunakan sebagai unit analisis untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara dalam menghadapi tantangan dunia yang kompleks dan dinamis. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam beberapa penelitian yang menganalisis tentang kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun di Amerika dan Eropa.<sup>72</sup>

Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo mencoba melakukan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir yang didasari pada asumsi bahwa Mesir kurang dipandang sebagai negara yang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang begitu besar. Mesir dianggap bukan sebagai negara sahabat yang dapat memenuhi kepentingan Indonesia dalam hal investasi saat ini. Daya tarik Mesir dalam hal ekonomi dinilai masih sangat kecil, sehingga kepentingan-kepentingan Indonesia saat ini di bawah Joko Widodo yang terkait dengan investasi lebih bisa didapat dengan cara membangun kerjasama dengan negara-negara kaya GCC seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan Saudi yang mampu memberikan komitmen investasinya.

Sebagaimana disampaikan dalam kunjungan Presiden Mesir Al-Sisi di Jakarta tahun 2015 yang lalu, fokus pemerintah Mesir saat ini untuk pembangunan dalam negerinya. Dalam upaya pembangunan tersebut, Mesir sangat membutuhkan Indonesia untuk bisa membantu memulihkan keadaan ekonomi dalam negeri setelah terjadinya peristiwa kudeta militer. Padahal dalam waktu yang bersamaan di

---

<sup>70</sup> Marck Pollack, *Rational Choice and EU Politics* (London: PittEdu, 2006).

<sup>71</sup> Bruce de Mesquita Buene, *Foreign Policy Analysis and Rational Choice Models* (New York: University/Stanford University, n.d.).

<sup>72</sup> Resqita Trisya Nurtyandini, "Analysis of Foreign Policy of The United States of The Joe Biden Era on Program Development Nuclear Iran," *Jurnal PIR (Power in International Relations)* 6, No. 2 (2022): 138–51.

bawah kepemimpinan Joko Widodo Indonesia sendiri juga sedang menerapkan kebijakan ekonomi dan investasi dalam negeri. Melihat karakter kepemimpinan Joko Widodo yang lebih mementingkan pembangunan ekonomi dalam negeri menjadi alasan bagi Joko Widodo untuk tidak menempatkan Mesir sebagai negara prioritas yang dikunjungi. Ia lebih memilih untuk meningkatkan intensitas hubungan bilateral dengan beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang dinilai sangat menguntungkan dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia saat ini.

Namun demikian teori pilihan rasional dalam kebijakan luar negeri sesungguhnya memiliki beberapa kelemahan. Teori pilihan rasional mengandaikan keluasaan informasi, pertimbangan manfaat terbesar, pertimbangan bebas nilai yang tidak nyata. Sehingga dalam konteks ini peneliti tidak berada dalam posisi yang mendukung teori ini sepenuhnya. Beberapa penelitian tentang kebijakan luar negeri memang tidak sedikit yang menggunakan pilihan rasional sebagai alternatif instrumen analisis yang digunakan untuk memahami tindakan aktor pengambil kebijakan. Akan tetapi dalam konteks melemahnya hubungan bilateral Indonesia-Mesir teori rasionalitas saja belum cukup untuk menjawab pertimbangan apa saja yang menjadikan Joko Widodo memutuskan untuk tidak mengunjungi Mesir. Masih terdapat variabel lain di luar pertimbangan rasional yang digunakan Joko Widodo dalam pengambilan kebijakan luar negerinya khususnya terhadap Mesir, yaitu pertimbangan psikologis. Sehingga dengan demikian pendekatan psikologis dalam kebijakan luar negeri digunakan oleh peneliti sebagai alternatif terhadap penjelasan rasional.

### **3. Pendekatan Psikologis dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri**

Proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam menyikapi kondisi global yang sangat dinamis dan kompleks terdiri dari banyak variabel yang harus diperhitungkan. Oleh karenanya dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara memiliki banyak faktor yang menjadi penentu

dalam pengambilan keputusannya. Selain faktor individu yang sudah peneliti uraikan di atas, terdapat faktor lain yang juga signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yaitu perlunya pendekatan psikologis dalam pengambilan keputusan. Faktor psikologis ini meliputi, keyakinan, kepribadian, imajinasi dan kognitif serta emosi atau suasana hati seseorang yang sangat memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Dalam teori ini pendekatan psikologis juga menguraikan bagaimana proses informasi yang diterima oleh seorang pengambil keputusan serta bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut menjadi signifikan. Sehingga berbeda dengan pendekatan rasional yang terfokus pada hasil keputusan dan pengambilan keputusan yang berdasar pada prinsip ekonomi.

Menurut pendapat Alex Mintz dan Karl DeRouen keyakinan atau kepercayaan yang dipegang atau dianut oleh seorang pemimpin dapat memberikan kerangka yang kuat dalam menafsirkan dan memahami situasi keputusan. Keyakinan yang dimiliki seorang pemimpin dapat menghalangi dan membentuk informasi yang masuk kepadanya, selain itu keyakinan juga dapat menyiratkan kesimpulan mengenai preferensi kebijakan yang akan diambil. Keyakinan juga dapat membentuk bagaimana para pemimpin memproses informasi yang ia dapat untuk selanjutnya dipertimbangkan serta diperhitungkan yang pada akhirnya menjadi sebuah keputusan.<sup>73</sup>

Dari sumber yang peneliti dapatkan dalam konteks kepemimpinan Joko Widodo saat ini, ia termasuk sebagai individu yang memiliki kepercayaan tersendiri dalam hal tertentu. Joko Widodo seakan memosisikan dirinya sebagai seorang Raja Jawa yang memiliki keyakinan tersendiri dalam penanggalan Jawa. Seperti dalam menentukan hari pelantikan Menteri atau pejabat negara setingkat menteri atau beberapa agenda besar terkait dengan pemerintahannya, ia selalu menggunakan perhitungan Jawa. Biasanya acara pelantikan dilakukan pada hari Rabu Pon atau Wage yang

---

<sup>73</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

dianggap sebagai hari keberuntungan.<sup>74</sup> Praktik yang dilakukan Joko Widodo tersebut menunjukkan adanya semacam kekhawatiran bagi Joko Widodo terhadap sesuatu akan terjadi atau menimpa dalam kepemimpinannya.

Selanjutnya adalah gaya dari seorang pemimpin tersebut juga menjadi faktor yang cukup dominan dalam pengambilan kebijakan. Dalam karya yang ditulis oleh Alex Mintz menerangkan individu yang kuat memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang sangat penting. Dengan melakukan analisis menggunakan konsep dari Alex Mintz, gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin akan membantu kita dalam memahami mengapa keputusan tertentu dibuat oleh pemimpin dan mengapa tindakan alternatif tidak diambil. Ini juga membantu kita untuk memahami proses keputusan itu sendiri. Dalam penjelasannya, Alex Mintz kemudian menguraikan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya dan karakter yang berbeda, salah satu gaya yang disebutkan dalam tulisannya itu adalah pemimpin yang bersifat pragmatis.

Berikutnya, faktor yang turut berperan besar dalam menentukan pengambilan kebijakan seorang pemimpin adalah faktor kognitif. Faktor kognitif ini dapat dijabarkan sebagai proses pemikiran, penalaran atau logika-logika berfikir yang digunakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin perlu memiliki pemahaman, pengetahuan yang mendalam tentang situasi atau masalah yang akan dihadapi. Pengetahuan akan informasi yang diterima sangat penting bagi aktor pengambil kebijakan dalam hal ini adalah keputusan yang diambil presiden. Dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik, ia dapat menganalisis dan memahami keputusan atau kebijakan yang akan diambil secara tepat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian *kualitatif*, sedangkan topik pembahasan yang akan diteliti adalah dinamika kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari era

---

<sup>74</sup> Afriansyah Noor, "For Your Pemilu: Peran PBB Dibalik Pencalonan Gibran" (Tirto.id, 2023).



Soekarno hingga Joko Widodo. Penelitian kualitatif memiliki tujuan memahami peristiwa yang dialami subjek penelitian kemudian dideskripsikan dalam kondisi yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.<sup>75</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer peneliti peroleh melalui metode wawancara dengan beberapa informan, diantaranya, Wakil Duta Besar RI untuk Mesir Bapak M. Aji Surya, Bapak Duta Besar RI untuk Qatar Bapak Deddy Saiful Hadi, Kedutaan Besar Mesir di Jakarta Mr. Ahmed, Ibu Ninik Rahayu dari Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri dan beberapa pakar politik luar negeri dari praktisi maupun akademisi, seperti Bapak Philips J. Vermonte dari CSIS, Muhammad Rosyidin dari UNDIP, Laode M Fatun dari UPN Veteran Jakarta dll. Kemudian data sekunder diperoleh dari literature artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah seperti tesis dan disertasi serta dokumen-dokumen tertulis mengenai hubungan Indonesia Mesir yang diperoleh dari KBRI di Mesir, Kedutaan Besar Mesir di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri RI.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari empat hal. Pertama melalui studi literatur atau kepustakaan, studi kepustakaan ini akan memaksimalkan referensi yang berasal dari kajian pustaka seperti buku-buku, jurnal, media/berita, karya tulis ilmiah, makalah dan tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan.<sup>76</sup> Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara (*interview*) karena dianggap “*sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian secara*

---

<sup>75</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2017).

<sup>76</sup> Ahmad Baidawi, “Research Methods, Globalization and Democratization and Its Impact on the Arab Spring Cause in Middle East,” in Proceeding The 5th International Student. Conference on Humanity Issues (Publisher Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana UMY, 2019).

*berhadap-hadapan*".<sup>77</sup> Di era modern sekarang ini, adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, kegiatan wawancara dimungkinkan dengan melalui media telekomunikasi. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber dari akademisi maupun praktisi yang memiliki pengetahuan, kepakaran dan pengalaman dalam bidang hubungan Indonesia-Mesir serta politik luar negeri Indonesia.

Metode pengumpulan data yang ketiga ialah melalui dokumentasi. "*Dokumentasi dilakukan untuk dapat memperoleh informasi/sumber yang kuat yang tersimpan dalam bentuk dokumen resmi, surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya*".<sup>78</sup> Metode terakhir yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah FGD (*Focus Group Discussion*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh makna sebuah peristiwa dari serangkaian orang melalui metode diskusi.<sup>79</sup> FGD digunakan peneliti sebagai metode untuk mendapatkan data-data yang relevan dan akurat.

Selanjutnya untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data digunakan melalui membaca, mengamati dan mempelajari seluruh data yang didapatkan dari hasil kajian pustaka, interview, dokumentasi, dan FGD. Selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, kajian pustaka, dokumentasi dan FGD kemudian dipilah, diklasifikasikan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Setelah data diklasifikasikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui artinya. Hasil data tersebut disesuaikan dengan pembahasan dalam penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan dalam analisis data diantaranya adalah proses memilah atau menyeleksi data yang sudah terkumpul sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan (verifikasi).<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Lukman Nul Hakim, "Review of Qualitative Method: Interview of the Elite," Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> M. B. Miles, "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods," *Beverly Hills: SAGE*, 1992.



Menurut Prof. Dr. Mudjia Rahardjo analisis data merupakan *“kegiatan untuk memberikan makna pada data dengan cara mengurutkan, mengklasifikasikan, memberi tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan”*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif akan sangat tepat dalam mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir.<sup>81</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Disertasi ini terbagi dalam lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir pada masa kepemimpinan Soekarno hingga Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan pada era Joko Widodo yang cenderung mengalami perubahan dari para presiden pendahulunya. Pasalnya dalam konteks politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah, Mesir menjadi salah satu negara yang menarik bagi terselenggaranya hubungan politik luar negeri Indonesia. Sementara itu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga disebutkan bahwa Mesir adalah negara yang memiliki peran fundamental dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Kunjungan Presiden RI dari era Soekarno sampai SBY juga sangat intensif dilakukan. Namun di masa Joko Widodo terdapat sebuah anomali di mana Joko Widodo sama sekali belum berkunjung ke Mesir. Selain itu pada bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas mengenai sejarah hubungan Indonesia-Mesir dan perjalanan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari Soekarno sampai SBY. Dalam bab II ini akan diuraikan

---

<sup>81</sup> Mozaik Desa, Pematang Serai, and Langkat Perspektif, “NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No. 4 (2022): 1483–90.

lebih lanjut mengenai politik luar negeri Indonesia dan kaitannya terhadap Mesir, bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan Mesir dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial kemasyarakatan dan upaya saling dukung Indonesia-Mesir di kancan internasional. Selanjutnya diuraikan juga tentang perjalanan kunjungan Republik Indonesia ke Mesir sejak era Soekarno sampai SBY dengan disertai peristiwa-peristiwa internasional dan politik luar negeri yang sedang terjadi.

Bab III membahas mengenai perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo terhadap Mesir. Di dalam bab ini pembahasan lebih banyak menyoroti mengenai perubahan politik luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo yang berbeda dari tradisi presiden sebelumnya serta peran besar Mesir terhadap penyebaran nilai Islam Wasathiyah di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam teori William D Coplin bahwa politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dapat saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, perubahan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir juga dapat berubah yang ditandai dengan adanya indikasi Joko Widodo selama periode kepemimpinannya tidak mengunjungi Mesir. Tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir dari 2014-2024 telah menjadi perubahan besar dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dari tradisi presiden sebelumnya yang sudah terstruktur.

Bab IV akan membahas tentang prioritas politik luar negeri Indonesia di masa Joko Widodo. Pada bab IV ini akan diawali dengan penjelasan mengenai prioritas politik luar negeri Joko Widodo saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Joko Widodo memiliki latar belakang yang berbeda dari presiden sebelumnya. Kemana arah prioritas dari politik luar negeri Joko Widodo juga diuraikan secara lengkap dalam bab IV. Prioritas dalam penguatan diplomasi ekonomi, prioritas dalam kerjasama ekonomi dengan Tiongkok dan upaya memperkuat kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti UAE dan Arab Saudi menjadi pokok bahasan dalam bab ini.

Bab V membahas pergolakan dalam negeri Mesir dan pertimbangan Joko Widodo tidak mengunjungi Mesir. Bagaimana

gambaran situasi yang terjadi di dalam negeri Mesir pada waktu terjadinya peristiwa Arab Spring dan peristiwa politik lainnya yang turut mewarnai. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi peristiwa tersebut akan diuraikan dalam bab V ini secara mendalam. Pada Bab V ini juga diuraikan mengenai profil negara Mesir. Terjadinya pergolakan di Mesir akibat dari fenomena Arab Spring menjadi salah satu penyebab bagi Joko Widodo untuk tidak mengunjungi Mesir. Faktor keamanan dalam negeri Mesir dan stabilitas politik di Mesir menjadi alasan yang kuat bagi Joko Widodo untuk tidak berkunjung ke Mesir pada periode kepemimpinannya.

Selain faktor keamanan dalam negeri Mesir sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, faktor latar belakang individu Joko Widodo juga menjadi hal yang penting untuk diamati. Latar belakang seorang individu yang berbeda menjadikan pendekatan dan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia juga berbeda. Kemudian karakter kepemimpinan Joko Widodo saat ini yang lebih memprioritaskan pada aspek ekonomi, pembangunan dan investasi juga menjadi alasan Joko Widodo tidak berkunjung ke Mesir. Yang ketiga adanya pertimbangan kognitif (faktor psikologis) Joko Widodo dalam menentukan pilihannya untuk tidak mengunjungi Mesir.

Bab VI yaitu penutup, berisikan kesimpulan dari analisis pembahasan secara umum serta saran mengenai keberlanjutan dalam penelitian ini terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir di masa kepemimpinan Joko Widodo.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada masa pemerintahan Soekarno, politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dapat dikatakan sedang berada pada titik yang sangat kuat atau bahkan dianggap ideal. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua negara juga menjadi tokoh utama dalam terbentuknya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta sebagai aktor kunci dari lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB). Kunjungan Soekarno ke Mesir juga sangat intensif dilakukan yang menandai bahwa Mesir menjadi prioritas dalam jantung politik luar negeri Indonesia. Di era Soeharto kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir mulai mengalami pasang-surut. Arah politik luar negeri Soeharto yang lebih condong pada kekuatan barat telah mengubah haluan politik luar negeri Indonesia dari presiden sebelumnya. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto tercatat hanya 2 kali mengunjungi Mesir. Kemudian pada era Habibie, terjadi kekosongan kunjungan Presiden RI ke Mesir. Masa kepemimpinan yang sangat singkat dan kondisi dalam negeri Indonesia yang sedang dalam krisis moneter pada waktu itu menjadi tantangan bagi Habibie dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap Mesir.

Selanjutnya di era Gus Dur, Mesir mulai menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Gus Dur menyampaikan bahwa ketika ia dilantik sebagai Presiden RI, ia akan senang apabila dapat mengunjungi Mesir. Gus Dur melakukan kunjungan ke Mesir sebanyak dua kali pada periode pertama sebagai presiden dan periode berikutnya. Kunjungan Gus Dur ke Mesir menjadi awal kembalinya tradisi Presiden Indonesia berkunjung ke Mesir. Kemudian dilanjutkan pada era Megawati, tradisi mengunjungi Mesir kembali dilakukan. Megawati tercatat mengunjungi Mesir sebanyak satu kali. Pada era Presiden SBY, ia kembali memperkuat hubungan Indonesia-Mesir melalui kebijakan politik luar negerinya. SBY menempatkan Mesir sebagai negara pertama dalam kunjungannya ke luar negeri

sebagai Presiden RI. Jumlah pejabat negara yang ikut ke Mesir pada waktu itu juga sangat banyak. Hal ini sebagai tanda bahwa Mesir sangat penting bagi Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, SBY juga telah membangun asrama bagi para pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar Kairo. Asrama tersebut dikenal dengan asrama SBY.

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir memiliki nuansa yang berbeda dari Presiden RI sebelumnya. Dari era Soekarno hingga SBY memiliki kesamaan yaitu melakukan upaya dalam menjaga hubungan baik antara Indonesia-Mesir dengan melakukan kunjungan ke Mesir, akan tetapi Joko Widodo justru tidak mengunjungi Mesir. Pendekatan romantisme masa lalu yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir serta peran Mesir yang begitu besar bagi Indonesia dalam bidang pendidikan dan keagamaan tidak digunakan sebagai instrument utama dalam pengambilan keputusan melalui kunjungan Joko Widodo ke Mesir. Sehingga Joko Widodo sampai akhir jabatannya terbukti belum pernah mengunjungi Mesir dan membalas kunjungan Presiden Mesir Al-Sisi ke Indonesia pada tahun 2015 serta undangan dari Presiden Al-Sisi pada tahun 2022.

Fakta tidak adanya kunjungan Presiden Joko Widodo ke Mesir menjadi sebuah fenomena baru dalam politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir. Indikasi tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir sebagaimana yang dilakukan oleh para presiden sebelumnya nampaknya disebabkan karena prioritas politik luar negeri Indonesia di era Joko Widodo bertujuan pada penguatan kerjasama ekonomi dan investasi dengan negara-negara Tiongkok, UAE dan Arab Saudi. Padahal semua Presiden Indonesia menganggap Mesir sebagai mitra yang penting bagi Indonesia. Tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir juga dapat menjadi kerugian tersendiri bagi Indonesia. Namun kondisi dalam negeri Mesir pasca revolusi 2011 dan kudeta militer pada tahun 2013 yang membawa perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan krisis dalam negeri juga menjadi penyebab Joko Widodo tidak mengunjungi Mesir.

Joko Widodo, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, bukanlah sosok yang memandang hubungan antarnegara berdasarkan

sejarah (romantisme) masa lalu. Sebaliknya, ia lebih mengedepankan pendekatan yang mencerminkan karakter pribadinya sebagai seorang pengusaha dan kurang akrab dengan isu politik luar negeri dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakannya. Selain itu, Joko Widodo juga bukan berasal dari kalangan yang agamis atau religius. Dalam kunjungan bilateralnya ke Mesir, pertimbangan utama Presiden Joko Widodo adalah ekonomi domestik dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh Indonesia saat ini dari hubungan tersebut.

Faktor selanjutnya yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan psikologis dalam pengambilan kebijakan luar negeri adalah adanya pertimbangan kognitif (faktor psikologis) yang memengaruhi Joko Widodo untuk tidak berkunjung ke Mesir. Hal ini menjadi salah satu temuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi baru dalam penelitian ini.

Pada akhir tahun 2023, saat Joko Widodo melakukan kunjungan ke Afrika, ia hanya mengunjungi beberapa negara di kawasan tersebut. Mesir tidak termasuk dalam agenda kunjungan tersebut. Hal ini tampak tidak biasa jika dibandingkan dengan pendahulunya, yang sering mengutamakan kunjungan ke Mesir sebagai bagian dari diplomasi luar negeri mereka. Joko Widodo terlihat sangat berhati-hati dan tampak memiliki kekhawatiran dalam rencana kunjungan ke Mesir, mengingat pengalaman masa lalu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur, yang masing-masing turun dari jabatannya setelah melakukan kunjungan ke negara tersebut.

Ketidakhadiran Joko Widodo dalam beberapa kesempatan untuk berkunjung ke Mesir dianggap oleh peneliti sebagai bentuk kerugian bagi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya dianggap gagal dalam meningkatkan kedekatan hubungan dengan Mesir dan mempertahankan tradisi kunjungan presiden yang telah lama terstruktur. Selain itu, peran besar Mesir dalam menyebarkan nilai-nilai Islam Wasatiyyah melalui Al-Azhar di Indonesia tampaknya tidak dianggap penting oleh Presiden Joko Widodo.

Tidak adanya kunjungan Joko Widodo ke Mesir, ditambah dengan prioritas politik luar negeri yang lebih menitikberatkan pada



penguatan diplomasi ekonomi serta kerja sama dengan negara-negara seperti Tiongkok, UEA, dan Arab Saudi, telah menggeser posisi Mesir sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo.

## **B. Saran**

Sebagai saran dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan bahwa uraian yang telah disampaikan di atas bukanlah akhir dari pembahasan mengenai dinamika kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek-aspek lain, seperti ekonomi, budaya, pendidikan (mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir), serta sikap Indonesia dan Mesir dalam forum internasional, dengan menggunakan data yang lebih mutakhir dan referensi yang lebih terkini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Terlebih lagi, isu kebijakan luar negeri bersifat sangat dinamis, sehingga topik pembahasan pun terus berkembang seiring waktu.

Dalam disertasi ini, peneliti menyadari bahwa hasil yang dicapai tentu tidak luput dari kekurangan. Peneliti memahami bahwa apa yang telah dikerjakan masih jauh dari kata sempurna. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum adanya kesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan Joko Widodo. Pengambilan data primer sejauh ini hanya dilakukan melalui narasumber dari Kedutaan Besar Mesir di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri RI. Peneliti juga belum dapat mengumpulkan data primer secara langsung di Mesir atau dari Kedutaan Besar RI di Kairo.

Keterbatasan ruang, waktu, dan sumber daya finansial yang masih belum mencukupi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengumpulan data langsung ke Mesir. Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan penelitian ini dengan menjunjung tinggi nilai akademik, orisinalitas, keotentikan, dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.



Sebagai bagian dari kesimpulan, peneliti ingin menyampaikan saran kepada para pemangku kebijakan luar negeri, khususnya pemimpin Indonesia, untuk mempertimbangkan sejarah sebagai salah satu variabel dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir di masa mendatang, bukan hanya berfokus pada motif ekonomi. Bagaimanapun juga, kunjungan Presiden RI ke Mesir merupakan langkah yang signifikan dalam menciptakan dan membangun kedekatan hubungan diplomatik. Tradisi ini telah menjadi bagian terstruktur dari kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir.

Kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, diharapkan agar tetap menjaga tradisi politik luar negeri Indonesia dalam hubungannya dengan Mesir, termasuk dengan melakukan kunjungan resmi ke negara tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Presiden RI sebelumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Abdellateef, Al-Weshah. "Challenges before Megawati Sukarnoputri." *University of Jordan*, 2016.
- Abdurrahman Mohammad Fachir. "Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Tentang Teori Resiprositas." *Jurnal CMES* 7, No. 2 (2014).
- Aditi, Chakrabarty. "Challenges before Megawati Sukarnoputri." *Economic and Political Weekly* 36, No. 36 (2001).
- Aftandilian, Gregory. "Can Egypt Lead the Arab World Again? Assessing Opportunities and Challenges For U.S. Policy." *JSTOR*, 2017.
- Agustinus Supriyanto. "Peran Konsul Jenderal Mesir di India Tahun 1947 Bagi Status Internasional Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2006).
- Ahmad M. Baqi. "Intensitas Hubungan Bilateral Indonesia dengan Uni Emirat Arab Meningkat Sejak Tahun 2015. Intensitas Hubungan Bilateral Indonesia dengan UEA Dapat Dilihat dari Meningkatnya Kunjungan dan Delegasi Negara Serta Kedekatan Pemimpin Kedua Negara. "Komitmen In." *INTERMESTIC. Journal of International Studies* 7, No. 1 (2022): 11–30.
- Ahmad Rizky M. Umar. "The Meaning of Independent and Active Foreign Policy: Revisiting Hatta's 1948 Speech. Hatta and Indonesia's Independent and Active Foreign Policy: Retrospect and Prospect." *Centre for Strategic and International Studies*, 2022.
- Ahmad Ubaedillah. "Articulation of Islam: President Joko Widodo's Foreign Policy 2014-2019." *Jurnal Hubungan Internasional* 11, No. 2 (2023).

- Aiyub, Mohsin. "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini dan Masa Depan: Suatu Tinjauan dan Saran Kedepan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, No. 62 (2019).
- Alam, Fihris Kholifatul, and Aris Eko Cahyono. "Perbandingan Modernisasi Pendidikan Islam Mesir dan Indonesia." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10, No. 10 (2022).
- Alvian, Rizki Alif, and Ganesh Cintika Putri. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, No. 2 (2017).
- Alvian, Rizky Alif, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhan. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, No. 1 (2018): 152–68.
- Amalinda, Savirani. "Post-Election Politics in Indonesia." *ISEAS-Yusof Ishak Institution*, 2020.
- Ananda, Rizki, and Hermi Susiatiningsih. "Analisis Faktor Kepemimpinan terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance di Mesir oleh Rezim Abdel Fattah Al-Sisi." *Journal International Relations Universitas Diponegoro* 5, No. 1 (2019).
- Andi, Purwono. "Islam in Foreign Policy: Promotion of Moderate Islam in Indonesia Foreign Policy 2004-2014." *Indonesian Journal of International Relations* 1, No. 1 (2017).
- Anthony, L. Smith. "Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?" *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 22, No. 3 (2000).
- Anwar, Dewi Fortuna. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* 3 (2010).

- Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia's Regional Foreign Policy After the 2019 Election." *National Bureau of Asian Research* 14, No. 4 (2019).
- Apriadi, Tamburaka. "Revolusi Timur Tengah. Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah." *NARASI*, 2011.
- Arief Sukino. "Dinamika Pendidikan Islam di Mesir dan Implikasinya terhadap Transformasi Keilmuan Ulama Nusantara." *Studia Didaktika Jurnal Ilmiah Pendidikan* 10, No. 1 (2016).
- Arifin, M. Zulhan. "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973." *Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 5, No. 1 (2018).
- Ariyantoro, Sandy Dwi. "Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin." *AVATARA Jurnal Pendidikan Sejarah* 6, No. 2 (2018).
- Astuti, Wiwiek Rukmini Dwi. "Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Journal of International Studies* 5, No. 1 (2020).
- Bama Andika Putra. "Indonesia's Leadership Role in ASEAN: History and Future Prospects." *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences* 1, No. 2 (2015).
- Basit, Abdul, and Slamet Haryono. "Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan." *Jurnal JAA* 5, No. 2 (2021).
- Bayu Marfiando. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, No. 2 (2020).
- Bernoussi, Zaynab El. "The 2018 Egyptian Elections and Lessons for the Arab World." *Academia Letters*, 2021.

- Budiana, Muhammad. "Analysis of Indonesia's Foreign Policy during President Joko Widodo." *Jurnal Mantik* 3, No. 6 (2022).
- Bunnell, Fredrick P. "No Title From Non-Alignment to Confrontation: 1960-1965 and Policy of Confrontation Phase One: August 1960-August 1962." *JSTOR*, 1966.
- Christophe Dorigné-Thomson. "Indonesia's African Foreign Policy Shift under President Joko Widodo." *The Asian Institute of Research. Journal of Social and Political Sciences* 4, No. 3 (2021).
- Connelly, Aaron L. "Indonesian Foreign Policy Under President Joko Widodo." *Lowy Institute for International Policy*, 2014.
- Connelly, Aaron L. "Indonesian Foreign Policy Under President Joko Widodo." *Lowy Institute for International Policy*, 2014.
- Demet Sefika Mangir. "Indonesia and Regionalism in Southeast Asia, ASEAN and Indonesian Foreign Policy." *Journal of Academic Perspective on Social Studies*, No. 1 (2020).
- Desa, Mozaik, Pematang Serai, and Langkat Perspektif. "NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, No. 4 (2022): 1483-90.
- Dorigné-Christophe, Thomson. "Indonesia's African Foreign Policy Shift under President Joko Widodo." *The Asian Institute of Research Journal of Social and Political Sciences* 4, No. 3 (2021).
- Ebegbulem, Joseph C. "Nigeria's National Interest and Foreign Policy: A Critical Evaluation." *International Journal of Research in Humanities and Social Studies* 6, No. 10 (2019).
- Effendi, Tonny Dian. "Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono Secara Komprehensif: Resensi Buku." *Indonesian Perspective* 2, No. 1 (2018).

- Elster, Jon. "Social Norms and Economic Theory." *Journal of Economic Perspectives*, American Economic Association 3, No. 4 (1989).
- Farizan, Fabian Nur. "Indonesia's Involvement in the Afghanistan Peacebuilding Process." *Global: Jurnal Politik Internasional* 22, No. 2 (2020).
- . "Indonesia's Involvement in the Afghansitan Peacebuilding Process." *Global: Jurnal Politik Internasional* 22, No. 2 (2020).
- Fogg, Kevin W. "Islam in Indonesia's Foreign Policy 1945-1949". Oxford Center for Islamic Studies, United Kindom." *Journal of Islamic Studies* 53, No. 2 (2015).
- Frederick P. Bunnell. "Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation." *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, No. 2 (1966).
- Greta Nabbs Keller. "Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership." *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 35, No. 1 (2013).
- Hafid Adim Pradana. "Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Cina Pada Awal Orde Baru." *Indonesian Perspective* 1, No. 1 (2016): 23-42.
- Haryono, Endi. "Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018: Challenges and Opportunities." *Global Strategis* 13, No. 2 (2020).
- Hatta, Mohammad. "Indonesia's Foreign Policy." *Foreign Affairs. Council on Foreign Relations* 31, No. 3 (1953).
- Heru Sutrisno. "Konfrontasi Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia (1963-1966)." *AVATARA Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, No. 3 (2013).



- I Gede Wahyu Wicaksana. "International Society: The Social Dimensions of Indonesia's Foreign Policy." *The Pasific Review*. Taylor & Francis, 2015.
- Indah Rizki Aruma Nurjannah. "Megawati Presidential Political Policy in 2001 – 2004." *Jurnal Historica* 2, No. 1 (2018).
- Iskandar. "Dukungan Mesir terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina Tahun 2011-2013." *Jom FISIP* 1, No. 2 (2014): 1–14.
- Istadiyantha. "Reinterpreting the Indonesia's Relations with the Middle East towards the Era of Society 5.0." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, No. 1 (2021).
- Jemadu, Aleksius, and Floranesia Lantang. "Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in the Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo." *Journal of ASEAN Studies* 9, No. 2 (2021).
- Jeremy M. Sharp. "Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S Foreign Policy." *Congressional Research Service Report*, 2011.
- Kai He. "Indonesia's Foreign Policy after Soeharto: International Pressure, Democratization, and Policy Change." *International Relations of the Asia-Pacific*. Published by Oxford University Press in Association with the Japan Association of International Relation 8, No. 1 (2008).
- Kikue Hamayotsu. "No Title Indonesia in 2014: The Year of Electing the "People's President." Published by: University of California Press 55, No. 1 (2015).
- Keling, Mohamad Faisol. "The Development of ASEAN from Historical Approach." *Canadian Center of Science and Education* 7, No. 7 (2011).
- Kevin W. Fogg. "Islam in Indonesias Foreign Policy, 1945-1949." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, No. 2 (2015).

- Khasyi'in, Nuril. "The Fall of President Muhammed Hosni Mubarak and the Prospects for Democratization in Egypt." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, No. 1 (2019).
- Khawaja, Noor-ul-Ain. "Egypt's Foreign Policy Analysis: From Nasser to Morsi." *Pakistan Institute of International Affairs* 66, No. 1 (2013).
- Karjadi Sindunegoro. "Indonesia's Foreign Policy." *Pakistan Horizon* 44, No. 1 (1991).
- Kusuma, Tomi. "Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967-1971)." *Jurnal Swarnadwipa* 5, No. 1 (2021).
- L, Connelly Aaron. "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges." *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 37, No. 1 (2015).
- Lantang, Aleksius Jemadu and Floranesia. "Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in the Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo." *Journal of ASEAN Studies* 9, No. 2 (2021).
- Liddle, William, and Saiful Mujani. "Indonesia in 2004: The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono." *University of California Press* 45, No. 1 (2005).
- Linda Sunarti. "Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama." *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2, No. 1 (2014).
- M, Mattes, Leeds BA, and Carroll R. "Leadership Turnover and Foreign Policy Change: Societal Interests, Domestic Institutions, and Voting in the United Nations." *International Studies Quarterly* 59, No. 2 (2015).
- Madu, Ludiro. "Indonesia's Foreign Policy Under President Joko Widodo: More Domestic and Nationalist Orientations." *International Journal of Scientific Research in Science and Technology* 3, No. 1 (2017).

- Marwan Kabalan. "Structures and Qatari Foreign Policy." *Journal Al-Muntaqa* 2, No. 2 (2019).
- Mietzner, Marcus. "How Joko Widodo Won and Democracy Survived." *Journal of Democracy* 25, No. 4 (2014).
- . "INDONESIA: Yudhoyono's Legacy between Stability and Stagnation." *ISEAS - Yusof Ishak Institute*, 2012.
- Mila, Nasihatul. "Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 2 (2020).
- Muhtadi, Burhanuddin. "Joko Widodo's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics." *Journal International Indonesian Economics Studies* 51, No. 3 (2015).
- Mumary, Songbatumis Aisyah. "The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono." *Polish Political Science Yearbook Poland* 50, No. 2 (2021).
- Murtadlo, Muhammad. "Egypt Indonesia Relationship For Modernization of Islamic Education." *Jurnal Al-Qalam* 24, No. 2 (2018).
- Nurtyandini, Resqita Trisya. "Analysis of Foreign Policy of the United States of the Joe Biden Era on Program Development Nuclear Iran." *Jurnal PIR (Power in International Relations)* 6, No. 2 (2022): 138–51.
- Nuruddin, Yayan Nurbayan, Hanik Mahliataussikah, Sri Harini Ekowati, Hanip Pujiati, and Syarfuni. "The Fall of Egyptian President Morsi and the Media Representation: A Critical Discourse Analysis of Kompas Daily Newspaper." *Pertanika Journals of Social Sciences and Humanities* 28, No. 2 (2020).
- Ogu, Michael I. "Rational Choice Theory: Assumptions, Strengths, and Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context." *Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)* 1, No. 3 (2013).

- Pan, Guang. "Revelations of Muhammad Ali's Reform for Egyptian National Governance." *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)* 7, No. 4, (2018).
- Pitsuwan, Fuadi. "Indonesia's Foreign Policy and the International Politics of the Islamic World." *The Indonesian Quarterly* 40, No. 4 (2012).
- Puspitasari, Shinta. "Arab Spring: A Case Study of Egyptian Revolution 2011." *Andalas Journal of International Studies* 6, No. 2 (2017).
- Ramly, Linda Nur, and RR. Terry Irenewati. "Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013)." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 12, No. 2, (2015): 92–99.
- Rania Ahmed Hemaïd. "Egyptian Foreign Policy: (Special Reference After the 25th of January Revolution)." *Publisher Adam Matthew Digital*, 2016.
- Rezaei, Masoud. "Egypt and 'Democracy Dilemma.'" *African Journal of Political Science and International Relations* 9, No. 6 (2015).
- Rijal, M. Fadhli. "Memahami Desain Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021).
- Rimapradesi, Yulia, and Ahmad Sahide. "Kepentingan Negara-negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4, No. 1 (2021).
- Rosyidin, Mohamad. "Foreign Policy in Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy and the Quest for Major Power Status in the Asian Century." *South East Asia Research* 25, No. 2 (2017).
- . "Regionalism Under Challenge: Ideas And Joko Widodo's Foreign Policy Towards Asean, 2014-2019." *Journal of ASEAN Studies* 8, No. 2 (2020).

- Rosyidin, Mohammad. "Regionalism Under Challenge: Ideas and Joko Widodo's Foreign Policy Towards Asean, 2014-2019." *Journal of ASEAN Studies* 8, No. 2 (2020): 147–72.
- Ruslin, Muh. "Pemikiran Keagamaan dan Kebangsaan Gus Dur." *Farabi* 12, No. 1 (2015).
- Safitri, Dini. "Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik." *Jurnal Komunikasi* 14, No. 4, (2014).
- Safrudin, and Iswantir. "Perkembangan dan Kontribusi Alumni Mesir terhadap Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, No. 2 (2022).
- Sahide, Ahmad, and Rezki Satris. "Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring." *Jurnal Sosial Politik* 7, No. 2 (2021).
- Radovanović, Bojana. "Rational Choice Theory and Charitable Giving." *Sociological Review* 53, No. 2 (2019).
- Salehun, Lisna Wati, and Yohanes Sulaiman. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia." *Jurnal Agregasi. Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 7, No. 2 (2019).
- Sambhi, Natalie. "Joko Widodo's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?" *Institute for Regional Security* 11, No. 2 (2015).
- Satris, Rezki. "Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel." *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, No. 2 (2019).
- Sherin, Virginia, and Hardi Alunaza. "The Role of President Abdel Fattah Al-Sisi's Government for the Development of Egypt's Post-Revolutionary Economic Reforms in 2011." *Jurnal CMES* 24, No. 2 (2021).

- Smith, Anthony L. "Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?" *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 22, No. 3 (2002).
- Sukma, Rizal. "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement." *Asian Survey* 49, No. 4 (2009).
- . "Indonesia's Bebas-aktif Foreign Policy and the 'Security Agreement' with Australia." *Australian Journal of International Affairs* 51, No. 2 (1997): 231–41.
- Sulaiman, and Rusdinal. "Sistem Pendidikan Mesir dan Perbandingannya dengan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna* 10, No. 3 (2021).
- Surwandono, and Ariyanto Nugroho. "Evaluating Indonesia's Diplomacy Policy for the Protection of Indonesian Citizens Abroad through the 'Duty of Care' Paradigm." *Politica* 13, No. 2 (2022).
- Suryadinata, Leo. "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia." *University of California Press* 35, No. 3 (1995).
- Syahdami, and Muhammad Sya'roni Rofii. "Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dan Lebih Dekat ke Salah Satu Blok, Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia?" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, No. 3 (2021).
- Tunggal, Aprilia Restuning. "Indonesia-Egypt Diplomacy: Darussalam Gontor and Al-Azhar University." *Journal of Islamic World and Politics* 4, No. 1 (2019): 49–55.
- Ulul, Albab Aji Widiatmaja dan. "Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional." *Politica* 10, No. 1 (2019).
- Weinstein, Franklin B. "The Uses of Foreign Policy in Indonesia; An Approach to the Analysis of Foreign Policy in the Less Developed Countries." *World Politics* 24, No. 3 (1972).



Widhiyoga, Ganjar, and Setyasih Harini. "Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014)." *Research Fair Unisri 2019* 3, No. 1 (2019): 561–78.

Widiatmaja, Aji. "Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics." *Politica* 10, No. 1 (2019).

Yani, Yanyan Mochamad. "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy." *Sosio Humaniora* 11, No. 1 (2009).

Yi, Xiaode. "Rediscovering the Transition in China's National Interest: A Neoclassical Realist Approach." *Journal of Current Chinese Affairs*, 2019.

Young, Ji Choi. "Rationality, Norms and Identity in International Relations." *Macmillan Publishers Ltd. International Politics* 52, No. 1 (2015).

Özhan, Taha. New Egypt versus the Felool: Struggle for Democracy." *Publisher Insight Turkey* 15, No. 1 (2013).

### **Buku:**

Abdurrahman Mohammad Fachir. *Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Resiprositas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Adi Widiatmaja dan Ulul Albab. *Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo*, 2019.

Agus Salim. *Foreign Policy Legitimacy and Moderate Islamic Identity in Indonesia The Megawati Government's Response to the International War on Terrorism (2001-2004)*. University of Melbourne, 2017.

Ahmad Baidawi. "Research Methods, Globalization and Democratization and Its Impact on the Arab Spring Cause in Middle East." In *Proceeding The 5 Th International Student. Conference on Humanity Issues*. Publisher Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana UMY, 2019.



- Ahmad Fuad Fanani. "SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy." *Discipline of International Relations School of International Studies Faculty of Social and Behavioural Sciences Flinders University*, 2012.
- Akbarzadeh, Sharam. *Routledge Handbook of International Relations In the Middle East*. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2019.
- Alsadat, Anwar. *From Illusion to Betrayal*, 2019.
- AM. Fachir. *Jauh di Mata Dekat di Hati. Potret Hubungan Indonesia Mesir*, (2009).
- Anwar, Dewi Fortuna. *Indonesia-China Relations: To Be Handled with Care*. Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, 2019.
- Arsip, Direktorat Pengolahan Deputy Bidang Konservasi. *Konferensi Asia Afrika Tahun 1955*, Jakarta, 2012.
- Azyumardi Azra. *Indonesia's Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond*. Jakarta: Palgrave Macmillan, 2015.
- . *Melacak Pengaruh dan Pergeseran Orientasi Tamatan Kairo*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Background Information. *Hubungan Bilateral Indonesia-Mesir. Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022.
- Bassam Tibi. *Islam in Global Politics: Conflict and Cross-Civilization Bridging*. New York: Routledge, 2012.
- Brigadir Jenderal (Brigjen TNI) Joko Purnomo. *Wawasan Kebangsaan di AKMIL Magelang*. Magelang: 2023.
- Brown, Michael Edward. *The International Dimensions of Internal Conflict*. Cambridge: Harvard University, 2018.

- Brown, Nathan J. *Arab Spring in Egypt*. Harvard Divinity School, 2016. <https://rpl.hds.harvard.edu/faq/arab-spring-egypt>.
- Bruce de Mesquita Buene. *Foreign Policy Analysis and Rational Choice Models*. New York: University/Stanford University, n.d.
- Coplin, William D. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publisher, 2017.
- Dayem, Fatimah Jamal Abdel. *Hubungan Mesir dan Indonesia*, 2020.
- Dessouki, Bahauddin Bahjah Ibrahim. *Ambassador of Egypt to Jakarta*. 2016.
- Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Background Information Hubungan Bilateral RI – Republik Arab Mesir*. 2015.
- Dodwell, Henry. *The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad Ali*. Cambridge: Cambridge University Press, 1931.
- Egeham, Lizsa. “Joko Widodo Diundang Presiden El-Sisi Hadiri KTT COP27 Di Mesir Pada November 2022.” *Liputan6*, 2022.
- Fachir, A.M. *Jauh di Mata Dekat di Hati; Potret Hubungan Indonesia Mesir*. Kairo: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 2009.
- . *Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Resiprositas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Fadli Zon. *The League of Parliamentarians for Al Quds (LP4Q). Why Indonesia Can't Normalize Relations with Israel?* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 2020.

Fariz, Donal. "Indonesian Corruption Watch (ICW)." *Tempo*, Oktober 14, 2019.

Fawcett, Louise. *International Relations of the Middle East. The Arab States and the Palestine Crisis*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Fiona, Ulla, Siwage Dharma Negara, and Deasy Simandjuntak. *Aspirations with Limitations: Indonesia's Foreign Affairs Under Susilo Bambang Yudhoyono*. ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018.

Ganewati Wuryandari. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Ghanem, Hafez. "Egypt's Difficult Transition: Why the International Community Must Stay Economically Engaged." *Global and Economy Working Paper*, 2014.

Hudson, Valerie M, and Benjamin S. Day. "Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory." *Third Edition*. Rowman & Littlefield, 2020.

I Gede Anak Agung. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965. The Basic Principles of Indonesia's Foreign Policy*. De Gruyter Mouton, 1973.

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. *Buku Diplomasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011.

———. "Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Background Information Hubungan Bilateral RI – Republik Arab Mesir*, 2022.

———. *Rencana Strategis 2020-2024*, 2020.

Indonesia, National Archives of the Republic of. *Guide Asian-African Conference Archives*, 2014.

International Crisis Group (ICG). "Asia Briefing Paper. Indonesia's Presidential Crisis," 2001.

Itet Tridjati S. "Laporan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Individu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Jakarta, 2018.

Karim, Moch Faisal. *Role Legitimation in Foreign Policy: The Case of Indonesia as an Emerging Power under Yudhoyono's Presidency (2004–2014)*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

kementrian. *Berita Negara Republik Indonesia. Nomor 1466 Tahun 2021. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021.

Konsuler, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Direktorat Jenderal Protokol dan. "Laporan Kinerja Tahun 2020." Jakarta, 2020.

L, Connelly Aaron. *Indonesian Foreign Policy Under President Joko Widodo*. Publisher Lowy Institute for International Policy, 2014.

Leifer, Michael. *Indonesia's Foreign Policy*. The Royal Institute of International Affairs, 1983.

Leo Suryadinata. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Penerbit LP3ES Anggota Ikapi, 2019.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Lida Christin Sinaga. *Hubungan-Indonesia Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanaan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press, 2013.

Lukman Nul Hakim. *Review of Qualitative Method: Interview of the Elite*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013.

- Lukman, Roni. *Peran Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Solusi Menghadapi Pengaruh Globalisasi*. Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- M. Aji Surya. *Deputy Chief of Mission the Embassy of the Republic of Indonesia to Kairo*, 2020.
- Marsudi, Ibu Retno. *Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2019-2024*, 2019.
- Miles, M. B. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE, 1992.
- Mintz, Alex, and Karl DeRouen. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Mohamed Kadry Said. *Dialogue on Globalization. Egypt's Foreign Policy in Global Change the Egyptian Role in Regional and International Politics*, 2006. FES Briefing Paper
- Mozinggo, David. *China's Policy Towards Indonesia 1949-1967*. Ithaca: Cornell University Press, 1981.
- Murray, Thomas R., and Dale L Brubaker. *Dissertations Academic Social Sciences-Research-Methodology Proposal Writing in Research*. London: Texas State University Press, 2000.
- Murtadlo, Muhamad, and Husen Hasan Basri. *Egypt and It's Implication for Modernizing of Education in Indonesia*. INCRE, 2019.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Neack, Laura. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era* (Second Edition). Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2008.
- Nihal El-Megharbel. *Sustainable Development Strategy: Egypt's Vision 2030 and Planning Reform*. New York: United Nation Development Programme, 2015.

Noor, Afriansyah. "For Your Pemilu: Peran PBB Dibalik Pencalonan Gibran." 2023.

Paciello, Maria Cristina. *Egypt: Changes and Challenges of Political Transition*. Istituto Affari Internazionali (IAI), 2011.

Perwita, Anak Agung Banyu, and Yanyan M. Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

———. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Plano, Jack C, and Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Bandung Abardin, 1999.

Pollack, Marck. *Rational Choice and EU Politics*. London: PittEdu, 2006.

PPN, Kementrian. "Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia Tahun 2016." Jakarta, 2016.

Pribadi, R. Dicky Johar. *Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU)*. Indonesia, 2019.

Rachbini, Didik J., and Dwi Ardhanariswari Sundrijo. *Evaluasi Politik Luar Negeri Indonesia & Perubahan Ekonomi Global*. 2020.

Rania, Ahmed Hemaïd. "Egyptian Foreign Policy (Special Reference after The 25th of January Revolution)." University of Madrid, 2017.

Retno Marsudi. "Indonesia's Foreign Policy and the Muslim World." 2023.

Retnowati, Endang. *Tatanan Orde Baru Distorsi Ideologi Pancasila*. Jakarta: LIPI Press, 2018.

RI, Arsip Nasional. "Masa Jabatan Presiden Habibbi Paling Singkat." 2015.

- . “Laporan Direktorat Jenderal Timur Tengah.” Jakarta, 2022.
- . “Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (2018)”.
- . “Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.” Jakarta, 2015.
- Rofaail, Mary. *The Defeated Pharaoh: The Fall of Hosni Mubarak*. Baylor University, 2018.
- Rosyidin, Mohamad, and Muhammad Tri Andika. *Indonesia dalam Pusaran Global: Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Rudi Candra. “Maqashid Shariah Sebagai Konsep Kepentingan Nasional dalam Politik Luar Negeri Indonesia.” dalam *Diskursus Soal Islam, Politik, dan Hubungan Internasional*. Depublish, 2020.
- Saleh Dawud Hammad. “الخارجية السياسية للدراسات العربي الديمقراطي امركز.” *اسيوية قضايا*, 2019.
- Saputra, Andhik Beni. “Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2011,” 2013.
- Sarwono, Ade Padmo. “Indonesian Foreign Policy.” In *Examining the Role of Ambassadors and Challenges in Achieving Gender Equality*. Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional BINUS UNIVERSITY, 2022.
- Singh, Bilveer. *Succession Politics in Indonesia the 1998 Presidential Elections and the Fall of Suharto*. Habibie’s Foreign Policy. London: Macmillan Press LTD, 2023.
- Sukma, Rizal. “Islam and Foreign Policy in the 1990s: Between Form and Substance. Islam and the Changing Domestic Context.” 1991.
- . “Islam in Indonesia’s Foreign Policy.” 2003.



Suryadinata, Leo. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Bandung: LP3ES anggota Ikapi, 2019.

Susmihara. *Sejarah Peradaban Dunia I*. Makasar: Alauddin University Press, 2017.

Syihab, Usman. *Rekaman Pengalaman Diplomasi Lunak Indonesia di Bumi Para Nabi Tahun 2016-2020*. Kairo: Pusat Kebudayaan Indonesia KBRI, 2022.

Teti, Andrea. "Political and Social Change in Egypt: Arab Transformation Project," 2017.

UI, FISIP. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Joko Widodo Jilid 2." 2019.

Utari, Sevira Marsanti, and Baiq Wardhani. "National Identity and Foreign Policy: Indonesia Million Friends Zero Enemy under Yudhoyono Regime." *ACIR 2018 - Airlangga Conference on International Relations*, 2018.

Wati, Vrameswari Omega. "Indonesia's Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action?" *Global Strategis*, 2021.

Weinstein, Franklin B. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto*. Ithaca: Cornell University Press, 1976.

Wetherbee, Donald E. "Indonesia's Foreign Policy in 2016: Garuda Hovering." *Southeast Asia Affairs*. ISEAS, 2017.

Wibisono, Aria Teguh Mahendra. *Political Elites and Foreign Policy: Democratization in Indonesia*. University of Leiden, 2009.

Wicaksana, I.W. *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations*. University of Western Australia, 2012.

———. "Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita)." 2014.

Wirajuda, Hasan. "CSIS 50th Anniversary Foreign Policy Dialogue Indonesia and the Regional Order." 2021.

Wirajuda, Muhammad Hadioanto. "The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management." *International Relations of the London School of Economics*, 2014.

Wittek, Rafael. *Rational Choice Theory*. EBSCO Publishing, University of Groningen, 2013.

Wittek, Rafael, Tom A.B. Snijders, and Victor Nee. *The Handbook of Rational Choice Social Research*. California: Stanford University Press, 2013.

YM, Jackson, and Pang. *From Rowing Between Two Reefs to Sailing in Two Oceans: The End Of 'A Thousand Friends, Zero Enemies*. Naval University, n.d.

### Website:

Abdullah, Syarifuddin. "Riyadh Summit: Joko Widodo Mewakili Asia." Kompasiana, 2017.  
<https://www.kompasiana.com/sabdullah/592281a78623bd8c2a902143/riyadh-summit-Joko-Widodo-mewakili-asia>.

Adryamarthanino, Verelladevanka. "Alasan Soeharto Dapat Memimpin Selama 32 Tahun." Kompas, 2021.  
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/12/110000879/alasan-soeharto-dapat-memimpin-selama-32-tahun?page=all>.

Aljazeera. "What Is the Arab Spring, and How Did It Start?" AlJazeera, 2020.  
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start>.

Aljazeera. "What Is the Arab Spring, and How Did It Start?" AlJazeera, 2020.  
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start>.

- Andrios, Benny. "Menag Terima Dubes Mesir, Bahas Kerja Sama Keagamaan Dan Harmonisasi Umat." Kementerian Agama RI, 2021. <https://kemenag.go.id/read/menag-terima-dubes-mesir-bahas-kerja-sama-keagamaan-dan-hamonisasi-umat-m8dgy-m8dgy>.
- Anwar Kurniawan. "Joko Widodo Dan Politik Falsafah JawaJoko Widodo Dan Politik Falsafah Jawa." detikNews, 2019. [https://news.detik.com/kolom/d-4572011/Joko\\_Widodo-dan-politik-falsafah-jawa](https://news.detik.com/kolom/d-4572011/Joko_Widodo-dan-politik-falsafah-jawa).
- Arbar, Thea Fathanah. "Cerita Lengkap Jalan Joko Widodo Di Abu Dhabi." CNBC Indonesia, 2020. [https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20201020111308-33-195616/cerita-lengkap-jalan-Joko\\_Widodo-di-abu-dhabi](https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20201020111308-33-195616/cerita-lengkap-jalan-Joko_Widodo-di-abu-dhabi).
- Arslanbenzer, Hakan. "Mohammed Morsi: Egypt's First Democratically Elected President." Anadolu Anjasi, 2020. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/mohamed-morsi-egypts-martyr-of-freedom-democracy/1880092>.
- Asmardika, Rahman. "Kunjungan Presiden Al Sisi Ke Jakarta Jadi Tolok Ukur Hubungan Indonesia-Mesir." OkeZone News, 2021. <https://news.okezone.com/read/2021/07/12/18/2439544/kunjungan-presiden-al-sisi-ke-jakarta-jadi-tolok-ukur-hubungan-indonesia-mesir>.
- Bahfein, Suhaiela. "Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hadiah Pangeran UEA." Kompas, 2022. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/27/060000421/masjid-raya-sheikh-zayed-solo-hadiah-pangeran-uea-diresmikan-17?page=all>.
- BBC. "Egypt Unrest: 846 Killed in Protests - Official Toll." BBC, 2011. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13134956>.
- . "Mohammed Morsi: Pria Yang Masa Kepresidenannya Dipangkas Militer Mesir." BBC News Indonesia, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48671746>.

- Bhwana, Petir Garda. "Joko Widodo Meets with Saudi Arabia's King Salman." *Tempo*, 2019.  
[https://en.tempo.co/read/1195762/Joko\\_Widodo-meets-with-saudi-arabias-king-salman](https://en.tempo.co/read/1195762/Joko_Widodo-meets-with-saudi-arabias-king-salman).
- Caesaria, Sandra Desi. "5 Universitas Terbaik Di Dunia Mana Pilihanmu?" *Kompas*, 2022.  
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/09/17/092708871/5-universitas-islam-terbaik-di-dunia-mana-pilihanmu?page=all>.
- Dyatmika, Gede Bagus Wahyu. "Meski Banyak Demo Di Kairo, SBY Tetap Ke Mesir." *Tempo*, 2013.  
<https://nasional.tempo.co/read/458351/meski-banyak-demo-di-kairo-sby-tetap-ke-mesir>.
- Deif, Eslam. "President Al-Sisi Agrees to 'Fight Terrorism' with Indonesian Counterpart." *Daily News Egypt*, 2015.  
<https://dailynewsegypt.com/2015/09/05/president-al-sisi-agrees-to-fight-terrorism-with-indonesian-counterpart/>.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. "Gubernur Khofifah Terima Kunjungan Dubes Mesir Untuk Indonesia." *Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*, 2021.  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-khofifah-terima-kunjungan-dubes-mesir-untuk-indonesia>.
- Ervianto, Toni. "Sekali Lagi Membaca Isyarat 'Gebuk' Presiden Joko Widodo." *detikNews*, 2017. <https://news.detik.com/kolom/d-3510068/sekali-lagi-membaca-isyarat-gebuk-presiden-joko-widodo>.
- Ezzat, Dina. "INTERVIEW: Egypt-Indonesia: New Agenda for Historic Ties." *Arham Online*, 2022.  
<https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/464503/Egypt/Foreign-Affairs/INTERVIEW-EgyptIndonesia-New-agenda-for-historic-t.aspx>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Kunjungan Joko Widodo Ke UEA Hasilkan Komitmen Bisnis Dan Investasi 32,7 Miliar Dollar AS." *Kompas*, 2021.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/22185421/kunjungan-joko-widodo-ke-uea-hasilkan-komitmen-bisnis-dan-investasi-327-miliar>.

- Febrianto, Nanda. “Di Depan Wapres, Mahasiswa Indonesia Di Mesir: Jumlah Pelajar 12.000, Kapasitas Asrama 1.200.” VOI, 2022. <https://voi.id/berita/225026/di-depan-wapres-mahasiswa-indonesia-di-mesir-jumlah-pelajar-12-000-kapasitas-asrama-1-200>.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor. “Joko Widodo Ajak Investor Ke IKN Tahun Depan Untuk Tawarkan Proyek.” *Bisnis Tempo*, 2023. <https://bisnis.tempo.co/>.
- Humas Wakil Presiden RI. “Arriving in Sharm El Sheikh, Vice President Ready to Attend COP27 Climate.” *Humas Wakil Presiden RI*, 2022. <https://www.wapresri.go.id/en/tiba-di-sharm-el-sheikh-wapres-siap-hadiri-ktt-perubahan-iklim-cop27/>.
- Icha Rastika. “Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kairo Diberi Nama ‘SBY.’” *Kompas*, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/14500631/Asrama.Mahasiswa.Indonesia.di.Kairo.Diberi>Nama.SBY>.
- indonesia.distanceworld. “Jarak Antara Arab Saudi Dan Mesir.” *indonesia.distanceworld*. Accessed January 19, 2023. <http://indonesia.distanceworld.com/cc/SA-EG>.
- Indonesia, Humas Sekretariat Kabinet Republik. “Hadiri KTT Arab Islam Amerika, Presiden Joko Widodo Sampaikan Upaya Indonesia Atasi Terorisme.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2017. <https://setkab.go.id/hadiri-ktt-arab-islam-amerika-presiden-joko-widodo-sampaikan-upaya-indonesia-atasi-terorisme/>.
- . “Laporan Empat Tahunan Pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2018. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Laporan-4-Tahun-Joko-Widodo-JK.pdf>.
- . “Presiden El-Sisi Undang Presiden Joko Widodo Hadiri COP27 Di Mesir.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2022. <https://setkab.go.id/presiden-el-sisi-undang-presiden-joko-widodo-hadiri-cop27-di-mesir/>.

- . “Presiden Joko Widodo Mengajak Para Investor Berinvestasi Di Indonesia.” Kementerian Sekretariat Negara RI, 2016. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_Joko\\_Widodo\\_mengajak\\_para\\_investor\\_berinvestasi\\_di\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_Joko_Widodo_mengajak_para_investor_berinvestasi_di_indonesia).
- . “Presiden RRT Xi Jinping Sambut Presiden Joko Widodo Dengan Upacara Kenegaraan.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. <https://setkab.go.id/23620/>.
- . “President Joko Widodo Visits Indonesia, UAE Pavillions at Expo 2020 in Dubai.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021. [https://setkab.go.id/en/president-Joko\\_Widodo-visits-indonesia-uae-pavillions-at-expo-2020-in-dubai/](https://setkab.go.id/en/president-Joko_Widodo-visits-indonesia-uae-pavillions-at-expo-2020-in-dubai/).
- . “Stabilitas Ekonomi Dan Politik Kunci Keberlanjutan Investasi.” Kementerian Sekretariat Negara RI, 2022. [https://www.setneg.go.id/baca/index/stabilitas\\_ekonomi\\_dan\\_politik\\_kunci\\_keberlanjutan\\_investasi](https://www.setneg.go.id/baca/index/stabilitas_ekonomi_dan_politik_kunci_keberlanjutan_investasi).
- . “Tiba Di Abu Dhabi, Presiden Joko Widodo Disambut Putra Mahkota UEA.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. [https://setkab.go.id/tiba-di-abu-dhabi-presiden-Joko\\_Widodo-disambut-putra-pangeran-uea/](https://setkab.go.id/tiba-di-abu-dhabi-presiden-Joko_Widodo-disambut-putra-pangeran-uea/).
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. “Pertemuan Bilateral Wakil Presiden Dan PM Mesir Bahas Kerja Sama Perdagangan, Pendidikan Dan Perubahan Iklim.” kemlu, 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4130/berita/pertemuan-bilateral-wakil-presiden-dan-pm-mesir-bahas-kerja-sama-perdagangan-pendidikan-dan-perubahan-iklim>.
- Isnaeini, Nadya. “Kunjungan Istimewa Joko Widodo Di Timur Tengah.” *Liputan6*, 2015. [https://www.liputan6.com/news/read/2318318/kunjungan-istimewa-Joko\\_Widodo-di-timur-tengah](https://www.liputan6.com/news/read/2318318/kunjungan-istimewa-Joko_Widodo-di-timur-tengah).
- Joko Widodo, Humas Sekretaris Kabinet Presiden. “Meet Qatar Entrepreneurs, President Joko Widodo: Currently, the Right Time to Invest in Indonesia.” *humas*, 2015. [https://setkab.go.id/en/meet-qatar-entrepreneurs-president-Joko\\_Widodo-currently-the-right-time-to-invest-in-indonesia/](https://setkab.go.id/en/meet-qatar-entrepreneurs-president-Joko_Widodo-currently-the-right-time-to-invest-in-indonesia/).



- . “President Joko Widodo Begins Working Visit to Three Middle East Countries.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. <https://setkab.go.id/en/president-joko-widodo-begins-working-visit-to-three-middle-east-countries/>.
- . “President Joko Widodo Visits Saudi Arabia.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019. <https://setkab.go.id/en/president-Joko-Widodo-visits-saudi-arabia/>.
- Julio, Emirald. “Setelah China, Presiden Mesir Sambangi Indonesia.” OKenews, 2015. <https://news.okezone.com/read/2015/09/03/18/1207686/setelah-china-presiden-mesir-sambangi-indonesia>.
- Kanavio Ahmad Rizqo. “Joko Widodo: Masjid Sheikh Zayed Jadi Simbol Persahabatan Indonesia-UEA.” detikNews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6406202/Joko-Widodo-masjid-sheikh-zayed-jadi-simbol-persahabatan-indonesia-uea>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. “Hubungan Bilateral Indonesai-Rusia.” kemenlu, 2011. <https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu>.
- Kementerian Luar Negeri RI. “Sejarah Hubungan Indonesia Mesir.” Kementerian Luar Negeri RI, 2022. <https://kemlu.go.id/Kairo/id/read/sejarah-hubungan-indonesia-mesir/1900/etc-menu>.
- Kuangan, Kementerian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (2010). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/9TAHUN2010UU.htm>.
- Lararenjana, Edelweis. “Nawacita Adalah 9 Agenda Prioritas Pemerintah Joko Widodo-JK, Ini Penjelasannya.” Merdeka.com, 2022. <https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-Joko-Widodo-jk-ini-penjasannya-kln.html>.



- Maharani, Esthi. "Dubai: 12 Ribu Mahasiswa Indonesia Kuliah Di Mesir." *Republika*, 2022.  
<https://www.republika.co.id/berita/rf7ynq335/dubai-12-ribu-mahasiswa-indonesia-kuliah-di-mesir>.
- Marsudi, Retno LP. "Indonesia and UAE, from Vision to Action." *The Jakarta Post*, 2020.  
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/01/13/indonesia-and-uae-from-vision-to-action.html>.
- Mena. "Al-Sisi Visits Indonesia." *Egypt Independent*, 2015.  
<https://www.egyptindependent.com/al-sisi-visits-indonesia/>.
- Michaelson, Ruth. "Sisi Wins Landslide Victory in Egypt Election." *The Guardian*, 2018.  
<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/02/sisi-poised-to-declare-landslide-victory-in-egypt-election>.
- Mulyana, Yayan GH. "The Indonesian Presidency and Foreign Policy Each Indonesian President Has Come to Shape, in Their Own Way, the Country's Foreign Policy." *The Diplomat*, 2018.  
<https://thediplomat.com/2018/03/the-indonesian-presidency-and-foreign-policy/>.
- News, Kumparan. "Pelantikan Presiden Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Kumparan News*, 2019.  
<https://kumparan.com/kumparannews/pelantikan-presiden-indonesia-dari-masa-ke-masa-1s5eZHMZ3Te/2>.
- Parameswaran, Prashanth. "Indonesia Turning Away from ASEAN Under Joko Widodo? Early Signs Point to a Far More Bilateral, Domestic-Oriented Foreign Policy." *The Diplomat*, 2014. <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-joko-widodo/>.
- Parlina, Ima, and Tama Salim. "President Joko Widodo Kicks off Middle East Tour." *Jakarta Post*, 2015.  
<https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/12/president-joko-widodo-kicks-middle-east-tour.html>. 2015.

- Piri, Dezi Rosalia. "Indonesia Provides \$10 Million to Support Capacity Building in Afghanistan." Kompas, 2021. <https://go.kompas.com/read/2021/09/14/171501374/indonesia-provides-10-million-to-support-capacity-building-in-afghanistan?page=all>.
- Prabowo, Gama, and Serafica Gischa. "Peradaban Mesir Kuno: Periodisasi Dan Sistem Pemerintahan." Kompas, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/123835369/peradaban-mesir-kuno-periodisasi-dan-sistem-pemerintahan?page=all>.
- Puspaningrum, Bernadette Aderi. "Biografi Tokoh Dunia. Abdul Fattah Al-Sisi Dan Kudeta Militer Bergelimang Darah Di Tanah Mesir." Kompas, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/06/233343370/biografi-tokoh-dunia-abdul-fattah-al-sisi-dan-kudeta-militer-bergelimang?page=all>.
- Rachmianto, Andy. "Indonesia Will Always Stand with Palestine." Jakarta Post, 2019. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/26/indonesia-will-always-stand-with-palestine.html>.
- Rahman Asmardika. "Persahabatan Presiden Soekarno Dan Gamal Abdel Nasser Dorong Hubungan Indonesia-Mesir." OkeZone News, 2021. <https://news.okezone.com/read/2021/07/12/18/2439238/persahabatan-presiden-soekarno-dan-gamal-abdel-nasser-dorong-hubungan-indonesia-mesir>.
- RI, Kementerian Luar Negeri. "Gerakan Non-Blok." Kementerian Luar Negeri RI, 2014. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman\\_list\\_lainnya/](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/).
- Salam, Moh. "Joko Widodo Ajak Investor Asing Untuk Investasi Di Indonesia, Ini Tujuannya." Tribun News, 2019. <https://palu.tribunnews.com/>.
- Savio, Roberto. "Boutros Boutros-Ghali—The Nobility of Ideas and Ideals." Southcentre, 2016.

<https://www.southcentre.int/Question/Boutros-Boutros-Ghali-The-Nobility-Of-Ideas-And-Ideals/>.

Schewe, Eric. "Why Did Ousted Egyptian President Morsi Lose Power?" JSTOR, 2019. <https://daily.jstor.org/why-did-ousted-egyptian-president-morsi-lose-power/>.

Setpres, BPMI. "Presiden Joko Widodo Targetkan Investasi Tahun 2023 Capai Rp1.400 Triliun." Presiden RI, 2023. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-Joko-Widodo-targetkan-investasi-tahun-2023-capai-rp1-400-triliun/>.

Shehata, Samer. "Profile of Egypt's New President Mohamed Morsi." wilson center, 2020. <https://www.wilsoncenter.org/profile-egypts-new-president-mohamed-morsi>.

Sinaga, Odelia. "Foreign Officials Attend Joko Widodo-JK's Inauguration." Tempo, 2018. <https://en.tempo.co/read/615708/foreign-officials-attend-Joko-Widodo-jks-inauguration>.

Siswanto, Ngadri. "Al-Azhar And Moderate: Exploring The Role Of Alumni Al-Azhar Of Egypt In Strengthening Ummah Unity In Indonesia Through The Concept Of Wasathiyyah". Religio Education. Volume 2, 2022.

Sutrisno, Elvan. "Wapres Ma'ruf Amin Hadiri KTT COP27 Mesir." detikNews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6391776/wapres-maruf-amin-hadiri-ktt-cop27-mesir>.

Tiezi, Shannon. "China, Egypt Consolidate Ties After Sisi's Attendance at Military Parade The Egyptian President's Second Trip to China in Nine Months Led to More Economic Deals." The Diplomat, 2015. <https://thediplomat.com/2015/09/china-egypt-consolidate-ties-after-sisis-attendance-at-military-parade/>.

Tiezzi, Shannon. "Xi's Visit Cements Egypt's Place on the 'Belt and Road' Xi Jinping Envisions Egypt as a Hub for China's Belt and Road Initiative." The Diplomat, 2016.

<https://thediplomat.com/2016/01/xis-visit-cements-egypts-place-on-the-belt-and-road/>.

Tikkanen, Amy. "Mohamed Morsi President of Egypt." Britannica, 2023. <https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Morsi>.

Widiastuti, Rina. "Joko Widodo Tegaskan Akan Gebuk Kelompok Yang Ingin Ganti Dasar Negara." Tempo, 2017. <https://nasional.tempo.co/read/876194/Joko-Widodo-tegaskan-akan-gebuk-kelompok-yang-ingin-ganti-dasar-negara>.

Wuryandari, Ganewati. "BRIN Research Professor: Two Factors Influence Indonesian Foreign Political Activism." BRIN, 2022. <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/17/brin-research-professor-two-factors-influence-indonesian-foreign-political-activism/>.

### **Wawancara:**

Ahmed, Mr. "The Embassy of Egypt in Jakarta." 2019.

Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan peneliti di beberapa tempat seperti di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Veteran Pembangunan Negeri (UPN) Jakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Dan Universitas Da, Universitas Veteran Pembangunan Negeri (UPN) Jakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Dan Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). "Banyak Dari Kalangan Akademisi Hubungan Internasional Dan Lainnya Belum Mengetahui Bahwa Presiden Joko Widodo Belum Mengunjungi Mesir Sejak 2014-2021 Sebagaimana Yang Senantiasa Dilakukan Para Presiden Pendahulunya." 2022.

Hadi, Deddy Saiful. "Hubungan Internasional Indonesia Dengan Qatar." 2023.

Imran, Ali. "Panitia Kunjungan Presiden Joko Widodo Bersama Rombongan Ke Qatar Pada Tahun 2015." 2023.

Rahayu, Ninik. “Fungsional Diplomat Madya Pada Direktur Timur Tengah.” 2023.

———. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” 2023.

———. “Penggunaan Terminologi Foreign Policy Dalam Bahasa Indonesia.” 2022.

Rosyidin, Muhamad. “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” 2022.

Rosyidin, Muhammad. “Penggunaan Terminologi Foreign Policy Dalam Bahasa Indonesia.” 2023.

Surya, M. Aji. “Hubungan Internasional Antara Indonesia Dan Mesir.” 2023.

Vermonte, Philips J. “Change and Continuity Dalam Politik Luar Negeri Indonesia Di Masa Presiden Joko Widodo.” 2023.

Widodo, Joko. “Latar Belakang Presiden RI.” 2022.